

TAHUN ANGGARAN
2023



LAPORAN KEUANGAN

**KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kota Bangun Darat Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kota Bangun Darat Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrua Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas pelaporan
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1 LRA
	5.1.1 Pendapatan-LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.2 LO
	5.2.1 Pendapatan-LO
	5.2.2 Beban
	5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
	5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
	5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
	5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
	5.3.1 Ekuitas Awal
	5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
	5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
	5.4 Neraca
	5.4.1 Aset
	5.4.2 Kewajiban
	5.4.3 Ekuitas
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
BAB VII	Penutup

BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023 Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun anggaran 2023 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 27.975.450.000,00 realisasinya mencapai 94,50% atau sebesar 26.437.139.472,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87%, dan Belanja Modal sebesar Rp1.891.810.940,00 atau 79,76 %.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023

Belanja Operasi	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	61.560.000,00	0,00	61.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa	24.483.768.532,00	0,00	24.483.768.532,00
Belanja Modal	1.891.810.940,00	0,00	1.891.810.940,00
Jumlah	26.437.139.472,00	0,00	26.437.139.472,00

Realisasi pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp 61.560.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.560.000,00 atau 100 %, karena Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan untuk pengelolaan keuangan pada APBD-P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun sebelumnya.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp24.483.768.532,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp Rp24.483.768.532,00 atau 100 %, karena Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan untuk pengelolaan keuangan pada APBD-P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun sebelumnya.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.891.810.940,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp Rp1.891.810.940,00 atau 100 %, karena Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan untuk pengelolaan keuangan pada APBD-P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun sebelumnya.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 antara lain:

- a. Menurunnya Realisasi pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat serta Pendapatan Asli Daerah.
- b. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan karena kesalahan penganggaran.

- c. Berkurangnya penerimaan dari dana transfer Pemerintah Pusat menjadikan banyak kegiatan yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2023 tidak bisa dibayarkan sehingga menimbulkan hutang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pihak ketiga.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk segera melakukan transfer dana kurang salur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Kepala Daerah mendorong Dinas Pendapatan untuk melakukan diversifikasi penerimaan daerah sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
- c. Kepala Daerah Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga terbebas dari kesalahan.
- d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan

akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja

mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;

- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) **Pemberian fasilitas/jasa**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya			
No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) **Persediaan**
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:
- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- 1) **Investasi Non Permanen**
- Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar

nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

- 2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi,

pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada

Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam-pakai atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai

persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2023.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2023.

5.1.1. BELANJA

Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp26.437.139.472,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun anggaran 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
BELANJA	27.975.450.000,00	26.437.139.472,00	94,50	0
BELANJA OPERASI	25.603.558.000,00	24.545.328.532,00	95,87	0
Belanja Pegawai	66.700.000,00	61.560.000,00	92,29	0
Belanja Barang	25.536.858.000,00	24.483.768.532,00	95,88	0
BELANJA MODAL	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0
Belanja Peralatan dan Mesin	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat tahun anggaran 2023 sebesar 27.975.450.000,00 terealisasi sebesar 26.437.139.472,00 atau 94,50%, dan untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 disebabkan Kecamatan Kota Bangun Darat adalah OPD Baru dan baru mendapatkan Anggaran APBD-P tahun 2023.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
BELANJA OPERASI	25.603.558.000,00	24.545.328.532,00	95,87	0
Belanja Pegawai	66.700.000,00	61.560.000,00	92,29	0
Belanja Barang	25.536.858.000,00	24.483.768.532,00	95,88	0

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 direncanakan

sebesar Rp 25.603.558.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Honorarium dan Belanja Jasa. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi 2023
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	51.120.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00
Jumlah	61.560.000,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 66.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 61.56.000,00 atau 92,29%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.5
Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2023
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.240.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.099.276,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	63.205.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	152.547.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.414.864,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.046.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53.312.500,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.907.709.417,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.025.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	713.628.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	86.306.100,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	112.150.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	42.000.000,00

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.800.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	700.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	29.700.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	577.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.500.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	645.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.900.000,00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	325.242.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	174.650.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	417.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	59.340.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	225.200.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	46.360.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	141.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.961.525,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.790.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.520.000.000,00
Jumlah	24.483.768.532,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 25.536.858.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.483.768.532,00 atau 95,88%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat di Tahun 2023 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Belanja Modal

Uraian	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
BELANJA MODAL	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0
Belanja Peralatan dan Mesin	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2023 SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp 2.371.892.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.891.810.940,00 atau 79,76 %, Belanja modal ini hanya berupa belanja modal peralatan dan mesin.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/-pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Kecamataa Kota Bangun Darat merupakan OPD Baru, sehingga tidak ada belanja untuk Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.7
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Realisasi 2023
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	553.300.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	153.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	362.310.940,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	496.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.600.000,00
Belanja Modal Personal Computer	291.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23.600.000,00
Jumlah	1.891.810.940,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.371.892.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.891.810.940,00 atau 79,76%. Dimana nilai yang tersisa adalah nilai kelebihan anggaran dari harga real dari peralatan dan mesin.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp 27.975.450.000,00, Defisit sebesar Rp 26.437.139.472,00.

5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 disajikan komparatif dengan tahun 2022 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 3 bulan, dimana Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan OPD baru beroperasi pada Anggaran APBD-P. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah sebesar Rp24.649.024.999,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp24.649.024.999,00 terdiri dari Beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Barang dan Jasa, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

Uraian	Realisasi 2023
Beban Tambahan Penghasilan ASN	97.444.694,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.560.000,00
Beban Barang	19.432.685.007,00
Beban Jasa	3.462.583.773,00
Beban Perjalanan Dinas	74.751.525,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.520.000.000,00
Jumlah	24.649.024.999,00

5.2.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp159.004.694,00 terdiri dari Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS untuk Bulan Desember 2023, Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai

Uraian	Realisasi 2023
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	97.444.694,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	51.120.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00
Jumlah	159.004.694,00

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 22.889.017.007,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2023
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.240.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.099.276,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	63.205.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	152.547.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.414.864,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.046.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53.312.500,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.907.709.417,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.025.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	713.628.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	86.306.100,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	112.150.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	42.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.800.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	700.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	29.700.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	577.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.500.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	645.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.900.000,00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	325.242.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	174.650.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	417.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	59.340.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	225.200.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	46.360.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	141.400.000,00
Jumlah	22.889.017.007,00

5.2.2.1.3. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 74.751.525,00 dengan rincian sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.2.7
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Realisasi 2023
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.961.525,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.790.000,00
Jumlah	74.751.525,00

5.2.2.1.4. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 1.520.000.000,00 ini merupakan belanja hadiah yang bersifat perlombaan dan ada pengurangan belanja sebesar Rp 72.000.000,00. Serta sudah di STS ke Pemerintah Daerah.

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(24.545.328.532,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	26.437.139.472,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.891.810.940,00	0,00

5.3.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar, dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2022 SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kota Bangun Darat adalah Kecamatan baru dan untuk pengelolaan anggaran hanya pada APBD-P Tahun 2023.

5.3.2. Surplus/Defisit-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 sebesar Rp(24.545.328.532,00).

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2023 dengan nilai

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset sebesar Rp 1.891.810.940,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin		
JUMLAH ASET TETAP	1.891.810.940,00	0,00
JUMLAH ASET	1.891.810.940,00	0,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	103.696.467,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	103.696.467,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	103.696.467,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	103.696.467,00	0,00

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Kewajiban dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Aset lancar SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat tidak memiliki saldo pada akhir Tahun 2023 dan 2022 dikarenakan semua saldo yang tersisa telah disetorkan kepada rekening kas umum daerah.

5.4.1.1.2. Persediaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan	3.774.853.190,00	0,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 3.774.853.190,00 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2023.

5.4.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp1.891.810.940,00 merupakan nilai aset tetap SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 dan 2019 Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Kertas Kerja Aset Tetap

NAMA SKPD : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALINAN JALAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	JUMLAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Sisa Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-
	koreksi mutasi masuk	-	-	-	-	-	-	-
	koreksi mutasi keluar	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 Sisa BMD	-	-	-	-	-	-	-
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	-	1.891.810.940,00	-	-	-	-	1.891.810.940,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-	-	-
	MUTASI TAMBAH	-	-	-	-	-	-	-
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	-	-	-	-	-	-	-
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-
5	Barang Temuan Baru (Muti Tahun 2023)	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	-
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	-	-	-	-	-	-	-
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	a) Barang Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-
	b) Barang Hilang	-	-	-	-	-	-	-
	c) Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	d) Aset P3D	-	-	-	-	-	-	-
	e) Aset PDAM/ Tang Pancang	-	-	-	-	-	-	-
	f) Aset Dikerjasamakan	-	-	-	-	-	-	-
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatibel	-	-	-	-	-	-	-
	a) Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
	b) Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-
	c) Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-	-	-	-	-	-	-
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	a) Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	b) Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	c) Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-	-	-	-	-	-	-
	a) antar KIB A - KIB B	-	-	-	-	-	-	-
	b) antar KIB A - KIB C	-	-	-	-	-	-	-
	c) antar KIB A - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	d) antar KIB A - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	e) antar KIB A - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	f) antar KIB B - KIB C	-	-	-	-	-	-	-
	g) antar KIB B - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	h) antar KIB B - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	i) antar KIB B - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	j) antar KIB C - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	k) antar KIB C - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	l) antar KIB C - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	m) antar KIB D - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	n) antar KIB D - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	o) antar KIB E - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
12		-	-	-	-	-	-	-
13		-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	-	-	-	-	-	-	-
	MUTASI KURANG	-	-	-	-	-	-	-
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	-	-	-	-	-	-	-
2	Koreksi Double Catat	-	-	-	-	-	-	-
3	Hibah Pembuka ke Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Modal yang Menupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
9	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	-	-	-	-	-	-	-
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	-	-	-	-	-	-	-
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	a) Barang Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-
	b) Barang Hilang	-	-	-	-	-	-	-
	c) Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	d) Aset P3D	-	-	-	-	-	-	-
	e) Aset PDAM/ Tang Pancang	-	-	-	-	-	-	-
	f) Aset Dikerjasamakan	-	-	-	-	-	-	-
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatibel	-	-	-	-	-	-	-
	a) Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
	b) Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-
	c) Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-	-	-	-	-	-	-
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	a) Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	b) Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	c) Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-	-	-	-	-	-	-
	a) antar KIB A - KIB B	-	-	-	-	-	-	-
	b) antar KIB A - KIB C	-	-	-	-	-	-	-
	c) antar KIB A - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	d) antar KIB A - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	e) antar KIB A - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	f) antar KIB B - KIB C	-	-	-	-	-	-	-
	g) antar KIB B - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	h) antar KIB B - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	i) antar KIB B - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	j) antar KIB C - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	k) antar KIB C - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	l) antar KIB C - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	m) antar KIB D - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	n) antar KIB D - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	o) antar KIB E - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
16		-	-	-	-	-	-	-
17		-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH MUTASI KURANG	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN	-	1.891.810.940,00	-	-	-	-	1.891.810.940,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT KERTAS KERJA OPD	-	1.891.810.940,00	-	-	-	-	1.891.810.940,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD	-	1.891.810.940,00	-	-	-	-	1.891.810.940,00
	Beban Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2023	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023 (jumlah)	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi RBHapung/Hutasi	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi RB	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi Penghapusan	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar	-	-	-	-	-	-	-
	SELISIR KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	-	-	-	-	-	-	-
	SELISIR KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	SELISIR NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat telah melakukan upaya penataan Aset Daerah Tahun 2023. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi setelah pemisahan antara Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang belum terdata dalam daftar di Kecamatan Kota Bangun sebagai Induk serta inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat di mana belum ada Mutasi barang dari Kecamatan Kota Bangun dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tanah	0,00	0,00

Saldo aset tanah SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	1.891.810.940,00	0,00

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.891.810.940,00. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2023 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2023
Kendaraan Bermotor Penumpang	553.300.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	153.000.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	362.310.940,00
Kendaraan Bermotor Khusus	496.000.000,00
Alat Kantor Lainnya	12.600.000,00
Personal Computer	291.000.000,00
Peralatan Personal Computer	23.600.000,00
Jumlah	1.891.810.940,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp0,00.

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.696.467,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Pendek	103.696.467,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp103.696.467,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Utang Belanja

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Beban	103.696.467,00	0,00

Saldo Utang Belanja sebesar Rp 103.696.467,00 merupakan Utang Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 atas tagihan listrik berupa tagihan listrik penerangan jalan umum (LPJU) sebesar Rp. 6.251.773,00 dan Belanja Pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan pada bulan Desember 2023 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya sebesar Rp. 97.444.694,00.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS	1.891.810.940,00	0,00

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang tertanam dalam aset SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.891.810.940,00.

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat, Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dimaksudkan untuk memperlancar tugas dan pelaksanaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Kecamatan Kota Nagun Darat merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Kota Bangun bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kota Bangun Darat terletak di Desa Kedang Ipil dengan Alamat Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535 Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Th. 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PD Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas meliputi :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan,
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan,

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 26.437.139.472,00 atau 94,50% dari anggaran belanja daerah yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 27.975.450.000,00;
- b. Total realisasi belanja operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87% dari anggaran belanja operasi yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 25.603.558.000,00;
- c. Total realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.891.810.940,00 atau 79,76% dari anggaran belanja modal yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 2.371.892.000,00;
- d. Nilai aset yang dikuasai SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 merupakan peralatan dan mesin sebesar Rp1.891.810.940,00;
- e. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 103.696.467,00 merupakan Utang Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 atas tagihan listrik berupa tagihan listrik penerangan jalan umum (LPJU) sebesar Rp. 6.251.773,00 dan Belanja Pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan pada bulan Desember 2023 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya sebesar Rp. 97.444.694,00.
- f. Nilai Ekuitas Dana SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.891.810.940,00.

Demikian laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2023 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

Kota Bangun, 15 Januari 2024
Pengguna Anggaran,

Julkifli, SE
NIP. 197502011998031004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000.000 Kecamatan Kota Bangun Darat

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	27.975.450.000,00	26.437.139.472,00	94,50	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.603.558.000,00	24.545.328.532,00	95,87	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	66.700.000,00	61.560.000,00	92,29	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.536.858.000,00	24.483.768.532,00	95,88	0,00
5.2	BELANJA MODAL	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(27.975.450.000,00)	(26.437.139.472,00)	0	0,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(27.975.450.000,00)	(26.437.139.472,00)	0	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000.0 Kecamatan Kota Bangun Darat

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	1.891.810.940,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	1.891.810.940,00	0,00
JUMLAH ASET	1.891.810.940,00	0,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	103.696.467,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	103.696.467,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	103.696.467,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	103.696.467,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
U P B : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	1.891.810.940,00
1	TANAH	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	1.891.810.940,00
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.564.610.940,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	0,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	12.600.000,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	0,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	314.600.000,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	0,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
U P B : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	0,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kota Bangun Darat Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

- r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrua Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas pelaporan
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1 LRA
	5.1.1 Pendapatan-LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.2 LO
	5.2.1 Pendapatan-LO
	5.2.2 Beban
	5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
	5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
	5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
	5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
	5.3.1 Ekuitas Awal
	5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
	5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
	5.4 Neraca
	5.4.1 Aset
	5.4.2 Kewajiban
	5.4.3 Ekuitas
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
BAB VII	Penutup

BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023 Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun anggaran 2023 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 27.975.450.000,00 realisasinya mencapai 94,50% atau sebesar 26.437.139.472,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87%, dan Belanja Modal sebesar Rp1.891.810.940,00 atau 79,76 %.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023

Belanja Operasi	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	61.560.000,00	0,00	61.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa	24.483.768.532,00	0,00	24.483.768.532,00
Belanja Modal	1.891.810.940,00	0,00	1.891.810.940,00
Jumlah	26.437.139.472,00	0,00	26.437.139.472,00

Realisasi pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp 61.560.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.560.000,00 atau 100 %, karena Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan untuk pengelolaan keuangan pada APBD-P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun sebelumnya.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp24.483.768.532,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp Rp24.483.768.532,00 atau 100 %, karena Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan untuk pengelolaan keuangan pada APBD-P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun sebelumnya.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.891.810.940,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp Rp1.891.810.940,00 atau 100 %, karena Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan untuk pengelolaan keuangan pada APBD-P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun sebelumnya.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 antara lain:

- a. Menurunnya Realisasi pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat serta Pendapatan Asli Daerah.
- b. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan karena kesalahan penganggaran.

- c. Berkurangnya penerimaan dari dana transfer Pemerintah Pusat menjadikan banyak kegiatan yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2023 tidak bisa dibayarkan sehingga menimbulkan hutang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pihak ketiga.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk segera melakukan transfer dana kurang salur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Kepala Daerah mendorong Dinas Pendapatan untuk melakukan diversifikasi penerimaan daerah sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
- c. Kepala Daerah Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga terbebas dari kesalahan.
- d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan

akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja

mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;

- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

- Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) **Penjualan**
- Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c) **Kemitraan**
- Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) **Pemberian fasilitas/jasa**
- Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya			
No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) **Persediaan**
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:
- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- 1) **Investasi Non Permanen**
- Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar

nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

- 2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi,

pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada

Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam-pakai atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai

persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2023.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2023.

5.1.1. BELANJA

Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp26.437.139.472,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun anggaran 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
BELANJA	27.975.450.000,00	26.437.139.472,00	94,50	0
BELANJA OPERASI	25.603.558.000,00	24.545.328.532,00	95,87	0
Belanja Pegawai	66.700.000,00	61.560.000,00	92,29	0
Belanja Barang	25.536.858.000,00	24.483.768.532,00	95,88	0
BELANJA MODAL	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0
Belanja Peralatan dan Mesin	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat tahun anggaran 2023 sebesar 27.975.450.000,00 terealisasi sebesar 26.437.139.472,00 atau 94,50%, dan untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 disebabkan Kecamatan Kota Bangun Darat adalah OPD Baru dan baru mendapatkan Anggaran APBD-P tahun 2023.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
BELANJA OPERASI	25.603.558.000,00	24.545.328.532,00	95,87	0
Belanja Pegawai	66.700.000,00	61.560.000,00	92,29	0
Belanja Barang	25.536.858.000,00	24.483.768.532,00	95,88	0

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 direncanakan

sebesar Rp 25.603.558.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Honorarium dan Belanja Jasa. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi 2023
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	51.120.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00
Jumlah	61.560.000,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 66.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 61.56.000,00 atau 92,29%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.5
Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2023
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.240.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.099.276,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	63.205.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	152.547.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.414.864,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.046.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53.312.500,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.907.709.417,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.025.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	713.628.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	86.306.100,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	112.150.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	42.000.000,00

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.800.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	700.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	29.700.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	577.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.500.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	645.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.900.000,00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	325.242.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	174.650.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	417.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	59.340.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	225.200.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	46.360.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	141.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.961.525,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.790.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.520.000.000,00
Jumlah	24.483.768.532,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 25.536.858.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.483.768.532,00 atau 95,88%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat di Tahun 2023 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Belanja Modal

Uraian	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
BELANJA MODAL	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0
Belanja Peralatan dan Mesin	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2023 SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp 2.371.892.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.891.810.940,00 atau 79,76 %, Belanja modal ini hanya berupa belanja modal peralatan dan mesin.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/-pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Kecamataa Kota Bangun Darat merupakan OPD Baru, sehingga tidak ada belanja untuk Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.7
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Realisasi 2023
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	553.300.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	153.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	362.310.940,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	496.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.600.000,00
Belanja Modal Personal Computer	291.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23.600.000,00
Jumlah	1.891.810.940,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.371.892.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.891.810.940,00 atau 79,76%. Dimana nilai yang tersisa adalah nilai kelibahan anggaran dari harga real dari peralatan dan mesin.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp 27.975.450.000,00, Defisit sebesar Rp 26.437.139.472,00.

5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 disajikan komparatif dengan tahun 2022 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 3 bulan, dimana Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan OPD baru beroperasi pada Anggaran APBD-P. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah sebesar Rp24.649.024.999,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp24.649.024.999,00 terdiri dari Beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Barang dan Jasa, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

Uraian	Realisasi 2023
Beban Tambahan Penghasilan ASN	97.444.694,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.560.000,00
Beban Barang	19.432.685.007,00
Beban Jasa	3.462.583.773,00
Beban Perjalanan Dinas	74.751.525,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.520.000.000,00
Jumlah	24.649.024.999,00

5.2.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp159.004.694,00 terdiri dari Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS untuk Bulan Desember 2023, Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai

Uraian	Realisasi 2023
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	97.444.694,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	51.120.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00
Jumlah	159.004.694,00

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 22.889.017.007,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2023
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.240.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.099.276,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	63.205.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	152.547.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.414.864,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.046.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53.312.500,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.907.709.417,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.025.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	713.628.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	86.306.100,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	112.150.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	42.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.800.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	700.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	29.700.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	577.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.500.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	645.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.900.000,00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	325.242.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	174.650.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	417.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	59.340.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	225.200.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	46.360.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	141.400.000,00
Jumlah	22.889.017.007,00

5.2.2.1.3. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 74.751.525,00 dengan rincian sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.2.7
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Realisasi 2023
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.961.525,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.790.000,00
Jumlah	74.751.525,00

5.2.2.1.4. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 1.520.000.000,00 ini merupakan belanja hadiah yang bersifat perlombaan dan ada pengurangan belanja sebesar Rp 72.000.000,00. Serta sudah di STS ke Pemerintah Daerah.

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(24.545.328.532,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	26.437.139.472,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.891.810.940,00	0,00

5.3.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar, dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2022 SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kota Bangun Darat adalah Kecamatan baru dan untuk pengelolaan anggaran hanya pada APBD-P Tahun 2023.

5.3.2. Surplus/Defisit-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 sebesar Rp(24.545.328.532,00).

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2023 dengan nilai

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset sebesar Rp 1.891.810.940,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin		
JUMLAH ASET TETAP	1.891.810.940,00	0,00
JUMLAH ASET	1.891.810.940,00	0,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	103.696.467,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	103.696.467,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	103.696.467,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	103.696.467,00	0,00

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Kewajiban dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Aset lancar SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat tidak memiliki saldo pada akhir Tahun 2023 dan 2022 dikarenakan semua saldo yang tersisa telah disetorkan kepada rekening kas umum daerah.

5.4.1.1.2. Persediaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan	3.774.853.190,00	0,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 3.774.853.190,00 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2023.

5.4.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp1.891.810.940,00 merupakan nilai aset tetap SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 dan 2019 Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Kertas Kerja Aset Tetap

NAMA SKPD : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALINAN JALAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	JUMLAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Sisa Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-
	koreksi mutasi masuk	-	-	-	-	-	-	-
	koreksi mutasi keluar	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 Sisa BMD	-	-	-	-	-	-	-
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	-	1.891.810.940	-	-	-	-	1.891.810.940,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-	-	-
	MUTASI TAMBAH	-	-	-	-	-	-	-
	1 Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	-	-	-	-	-	-	-
	2 Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	3 Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-
	4 Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-
	5 Barang Temuan Baru (Muti Tahun 2023)	-	-	-	-	-	-	-
	6 Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	-
	7 Mutasi Masuk dari OPD Lain	-	-	-	-	-	-	-
	8 Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	a) Barang Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-
	b) Barang Hilang	-	-	-	-	-	-	-
	c) Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	d) Aset P3D	-	-	-	-	-	-	-
	e) Aset PDAM/ Tang Pancang	-	-	-	-	-	-	-
	f) Aset Dikerjasamakan	-	-	-	-	-	-	-
	9 Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatibel	-	-	-	-	-	-	-
	a) Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
	b) Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-
	c) Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-	-	-	-	-	-	-
	10 Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	a) Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	b) Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	c) Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	11 Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-	-	-	-	-	-	-
	a) antar KIB A - KIB B	-	-	-	-	-	-	-
	b) antar KIB A - KIB C	-	-	-	-	-	-	-
	c) antar KIB A - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	d) antar KIB A - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	e) antar KIB A - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	f) antar KIB B - KIB C	-	-	-	-	-	-	-
	g) antar KIB B - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	h) antar KIB B - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	i) antar KIB B - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	j) antar KIB C - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	k) antar KIB C - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	l) antar KIB C - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	m) antar KIB D - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	n) antar KIB D - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	o) antar KIB E - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
12.		-	-	-	-	-	-	-
13.		-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	-	-	-	-	-	-	-
	MUTASI KURANG	-	-	-	-	-	-	-
	1 Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	-	-	-	-	-	-	-
	2 Koreksi Double Catat	-	-	-	-	-	-	-
	3 Hibah Pembuka ke Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	4 Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-
	5 Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-
	6 Belanja Modal yang Menupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-
	7 Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-
	8 Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
	9 Barang Diserahkan ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-
	10 Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	-	-	-	-	-	-	-
	11 Mutasi Keluar ke OPD Lain	-	-	-	-	-	-	-
	12 Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	a) Barang Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-
	b) Barang Hilang	-	-	-	-	-	-	-
	c) Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	d) Aset P3D	-	-	-	-	-	-	-
	e) Aset PDAM/ Tang Pancang	-	-	-	-	-	-	-
	f) Aset Dikerjasamakan	-	-	-	-	-	-	-
	13 Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatibel	-	-	-	-	-	-	-
	a) Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
	b) Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-
	c) Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-	-	-	-	-	-	-
	14 Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	a) Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	b) Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	c) Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-	-	-	-	-	-	-
	15 Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-	-	-	-	-	-	-
	a) antar KIB A - KIB B	-	-	-	-	-	-	-
	b) antar KIB A - KIB C	-	-	-	-	-	-	-
	c) antar KIB A - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	d) antar KIB A - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	e) antar KIB A - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	f) antar KIB B - KIB C	-	-	-	-	-	-	-
	g) antar KIB B - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	h) antar KIB B - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	i) antar KIB B - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	j) antar KIB C - KIB D	-	-	-	-	-	-	-
	k) antar KIB C - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	l) antar KIB C - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	m) antar KIB D - KIB E	-	-	-	-	-	-	-
	n) antar KIB D - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
	o) antar KIB E - KIB F	-	-	-	-	-	-	-
16.		-	-	-	-	-	-	-
17.		-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH MUTASI KURANG	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN	-	1.891.810.940,00	-	-	-	-	1.891.810.940,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT KERTAS KERJA OPD	-	1.891.810.940,00	-	-	-	-	1.891.810.940,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD	-	1.891.810.940,00	-	-	-	-	1.891.810.940,00
	Beban Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2023	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023 (jumlah)	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi RBHapung/Hutasi	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi RB	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi Penghapusan	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk	-	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar	-	-	-	-	-	-	-
	Selisih KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	-	-	-	-	-	-	-
	Selisih KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	Selisih NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat telah melakukan upaya penataan Aset Daerah Tahun 2023. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi setelah pemisahan antara Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang belum terdata dalam daftar di Kecamatan Kota Bangun sebagai Induk serta inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat di mana belum ada Mutasi barang dari Kecamatan Kota Bangun dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tanah	0,00	0,00

Saldo aset tanah SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	1.891.810.940,00	0,00

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.891.810.940,00. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2023 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2023
Kendaraan Bermotor Penumpang	553.300.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	153.000.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	362.310.940,00
Kendaraan Bermotor Khusus	496.000.000,00
Alat Kantor Lainnya	12.600.000,00
Personal Computer	291.000.000,00
Peralatan Personal Computer	23.600.000,00
Jumlah	1.891.810.940,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp0,00.

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.696.467,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Pendek	103.696.467,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp103.696.467,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Utang Belanja

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Beban	103.696.467,00	0,00

Saldo Utang Belanja sebesar Rp 103.696.467,00 merupakan Utang Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 atas tagihan listrik berupa tagihan listrik penerangan jalan umum (LPJU) sebesar Rp. 6.251.773,00 dan Belanja Pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan pada bulan Desember 2023 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya sebesar Rp. 97.444.694,00.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS	1.891.810.940,00	0,00

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang tertanam dalam aset SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.891.810.940,00.

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat, Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dimaksudkan untuk memperlancar tugas dan pelaksanaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Kota Bangun bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kota Bangun Darat terletak di Desa Kedang Ipil dengan Alamat Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535 Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Th. 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PD Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas meliputi :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan,
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan,

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 26.437.139.472,00 atau 94,50% dari anggaran belanja daerah yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 27.975.450.000,00;
- b. Total realisasi belanja operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87% dari anggaran belanja operasi yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 25.603.558.000,00;
- c. Total realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.891.810.940,00 atau 79,76% dari anggaran belanja modal yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 2.371.892.000,00;
- d. Nilai aset yang dikuasai SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 merupakan peralatan dan mesin sebesar Rp1.891.810.940,00;
- e. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 103.696.467,00 merupakan Utang Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 atas tagihan listrik berupa tagihan listrik penerangan jalan umum (LPJU) sebesar Rp. 6.251.773,00 dan Belanja Pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan pada bulan Desember 2023 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya sebesar Rp. 97.444.694,00.
- f. Nilai Ekuitas Dana SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.891.810.940,00.

Demikian laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2023 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

Kota Bangun, 15 Januari 2024
Pengguna Anggaran,

Julkifli, SE
NIP. 197502011998031004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000.000 Kecamatan Kota Bangun Darat

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	27.975.450.000,00	26.437.139.472,00	94,50	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.603.558.000,00	24.545.328.532,00	95,87	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	66.700.000,00	61.560.000,00	92,29	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.536.858.000,00	24.483.768.532,00	95,88	0,00
5.2	BELANJA MODAL	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(27.975.450.000,00)	(26.437.139.472,00)	0	0,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(27.975.450.000,00)	(26.437.139.472,00)	0	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000.0 Kecamatan Kota Bangun Darat

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	1.891.810.940,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	1.891.810.940,00	0,00
JUMLAH ASET	1.891.810.940,00	0,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	103.696.467,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	103.696.467,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	103.696.467,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	103.696.467,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bidang : Kecamatan

Unit Organisasi : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

U P B : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	1.891.810.940,00
1	TANAH	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	1.891.810.940,00
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.564.610.940,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	0,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	12.600.000,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	0,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	314.600.000,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	0,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000.0 Kecamatan Kota Bangun Darat

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	1.891.810.940,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	1.891.810.940,00	0,00
JUMLAH ASET	1.891.810.940,00	0,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	103.696.467,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	103.696.467,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	103.696.467,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	103.696.467,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000.000 Kecamatan Kota Bangun Darat

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	27.975.450.000,00	26.437.139.472,00	94,50	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.603.558.000,00	24.545.328.532,00	95,87	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	66.700.000,00	61.560.000,00	92,29	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.536.858.000,00	24.483.768.532,00	95,88	0,00
5.2	BELANJA MODAL	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.371.892.000,00	1.891.810.940,00	79,76	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(27.975.450.000,00)	(26.437.139.472,00)	0	0,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(27.975.450.000,00)	(26.437.139.472,00)	0	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000.000 Kecamatan Kota Bangun Darat

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
8	KEGIATAN OPERASIONAL				
	BEBAN DAERAH	24.545.328.532,00	0,00	24.545.328.532,00	0
	BEBAN OPERASI	24.545.328.532,00	0,00	24.545.328.532,00	0
	8.1	61.560.000,00	0,00	61.560.000,00	0
	8.1.01	24.483.768.532,00	0,00	24.483.768.532,00	0
8.1.02	Beban Barang dan Jasa				
		(24.545.328.532,00)	0,00	(24.545.328.532,00)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
		0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(24.545.328.532,00)	0,00	(24.545.328.532,00)	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	POS LUAR BIASA				
		(24.545.328.532,00)	0,00	(24.545.328.532,00)	0

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kecamatan Kota Bangun Darat
PENGUNGUNG ANGGARAN
JUL KHEL, SE
NIP. 1975022011998031004
Tenggarong, 31 Desember 2023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000.0 Kecamatan Kota Bangun Darat

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(24.545.328.532,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	26.437.139.472,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.891.810.940,00	0,00

Tanggal: 31 Desember 2023
PENGUNG APGARAN
KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT
JOSEPH LUSE
NIP. 197302011998031004



NAMA SKPD : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERRJAAN	JUMLAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	-						-
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Simda Keuangan							-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-						-
	Koreksi mutasi masuk							-
	Koreksi mutasi keluar							-
	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	-						-
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 Simda BMD							-
2.	BELANJA MODAL JANUARI SID 31 DESEMBER 2023		1.891.810.940					1.891.810.940,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI SID 31 DESEMBER 2023							-
4.								-
	MUTASI TAMBAH							-
	1 Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)							-
	2 Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain							-
	3 Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa							-
	4 Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023							-
	5 Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2023)							-
	6 Pengakuan Hutang Tahun Berjalan							-
	7 Mutasi Masuk dari OPD Lain							-
	8 Reklasifikasi dari Aset Lainnya							-
	a Barang Rusak Berat							-
	b Barang Hilang							-
	c Aset Tak Berwujud							-
	d Aset P3D							-
	e Aset PDAM / Tiang Pancang							-
	f Aset Dikerjasamakan							-
	9 Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompetabel							-
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap							-
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat							-
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D							-
	10 Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil InventarisasiSensus BMD Tahun 2012/2013							-
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	11 Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)							-
	a antar KIB A - KIB B							-
	b antar KIB A - KIB C							-
	c antar KIB A - KIB D							-
	d antar KIB A - KIB E							-
	e antar KIB A - KIB F							-
	f antar KIB B - KIB C							-
	g antar KIB B - KIB D							-
	h antar KIB B - KIB E							-
	i antar KIB B - KIB F							-
	j antar KIB C - KIB D							-
	k antar KIB C - KIB E							-
	l antar KIB C - KIB F							-

JUMLAH MUTASI KURANG									
BALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN				-					
BALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT KERTAS KERJA OPD				-	1.891.810.940,00	-	-	-	1.891.810.940,00
BALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD				-	1.891.810.940,00	-	-	-	1.891.810.940,00
Beban Penyusutan									
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2023				-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023 (murni)				-	-	-	-	-	-
Koreksi Akumulasi R/Hapus/Mutasi				-	-	-	-	-	-
Koreksi Akumulasi RB				-	-	-	-	-	-
Koreksi Akumulasi Penghapusan				-	-	-	-	-	-
Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk				-	-	-	-	-	-
Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar				-	-	-	-	-	-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD									
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN				-	-	-	-	-	-
SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN				-	-	-	-	-	-

5 ASET LAINNYA									
1 BARANG RUSAK BERAT									
1 Barang Rusak Berat 2022 (saldo awal)				-	-	-	-	-	-
2 Barang Rusak Berat 2023				-	-	-	-	-	-
3 Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2023				-	-	-	-	-	-
4 Barang Rusak Berat dibawah Kapitalisasi				-	-	-	-	-	-
JUMLAH BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2023									
2 BARANG HILANG									
1 Barang Hilang 2022 (saldo awal)				-	-	-	-	-	-
2 Barang Hilang 2023				-	-	-	-	-	-
3 Penghapusan dengan BA Kehilangan dari Kepolisian Tahun 2023				-	-	-	-	-	-
JUMLAH BARANG HILANG TAHUN 2023									
3 ASET TAK BERWUJUD									
1 Aset Tidak Berwujud Tahun 2022				-	-	-	-	-	-
2 Belanja Modal Tahun 2023				-	-	-	-	-	-
3 Mutasi				-	-	-	-	-	-
Amortisasi 2022				-	-	-	-	-	-
Beban amortisasi				-	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2023									
Amortisasi 2022									
4 ASET P3D (Personil, Pendaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen)				-	-	-	-	-	-
1 Aset P3D Tahun 2022				-	-	-	-	-	-
2 Aset P3D Tahun 2023				-	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET P3D TAHUN 2023									
5 ASET DIKERJASAMAKAN									
1 Aset Dikerjasamakan Tahun 2022				-	-	-	-	-	-
2 Aset Dikerjasamakan Tahun 2023				-	-	-	-	-	-
3 Mutasi Aset Dikerjasamakan				-	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET DIKERJASAMAKAN TAHUN 2023									
JUMLAH ASET LAINNYA									
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023				-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Per 31 DESEMBER 2023				-	-	-	-	-	-
Koreksi Penghapusan RB				-	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan RB 2023				-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : B.060/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Pada Hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami selaku Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ERHAMSYAH**
NIP : **19820401 201001 1 011**
Pangkat/gol : **Pengatur Muda II/a**
Jabatan : **Pengurus Barang**
Dalam hal ini bertindak sebagai an. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kota Bangun Darat, selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **SOFIANSYAH, SE**
NIP : **19761228 200701 1 014**
Pangkat/gol : **Penata/ IIIc**
Jabatan : **Kasubbag. Program dan Keuangan**
Dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Kecamatan Kota Bangun Darat, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi di buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung laporan BMD dan Laporan Neraca.

Pihak Kedua,

SOFIANSYAH, SE
NIP. 19761228 200701 1 014

Pihak Pertama,

ERHAMSYAH
NIP. 19820401 201001 1 011

Mengetahui :



NIP. 19750201 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535

Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

SURAT PERYATAAN

Nomor : B. 069/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Julkifli, SE**
NIP : 19750201 199803 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa belum pernah menerima dropping barang kategori Persediaan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi tahun 2023 dan tidak di catat dalam Laporan keuangan tahun 2023.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bangun Darat, 12 Januari 2023

Camat,


JULKIFLI, SE
Pembina

NIP. 19750201 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535

Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

SURAT PERYATAAN

Nomor : B.067/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Julkifli, SE**
NIP : 19750201 199803 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa belum pernah menerima dropping barang kategori Aset Tetap dari Pemerintah Pusat atau Provinsi tahun 2023 dan tidak di catat dalam Laporan keuangan tahun 2023.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bangun Darat, 12 Januari 2024

Camat,

JULKIFLI, SE
Pembina

NIP. 19750201 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

SURAT PERYATAAN

Nomor : B.068/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

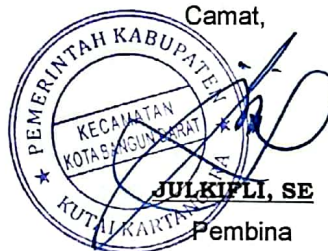
Nama : **Julkifli, SE**
NIP : 19750201 199803 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa barang kondisi rusak berat 31 Desember 2023 dan belum pernah dikeluarkan dari daftar persediaan yang di sertakan daftarnya yang berisi informasi nama barang yang rusak berat, jumlah barang, tanggal barang, dilakukan pemusnahan di tahun 2023 serta Berita Acara Pemusnahannya tidak ada.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bangun Darat, 12 Januari 2024

Camat,


JULKIFLI, SE
Pembina

NIP. 19750201 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

SURAT PERYATAAN

Nomor : B.071/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Julkifli, SE**
NIP : 19750201 199803 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa **Tidak Terdapat** Pemeliharaan/renovasi atas aset tetap (berupa Gedung dan Bangunan dan Jalan, irigasi dan Jaringan) yang bukan milik Pemerintah Daerah dan telah/belum di keluarkan dari daftar aset.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bangun Darat, 12 Januari 2023

Camat,


JULKIFLI, SE
Pembina
NIP. 19750201 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

SURAT PERYATAAN

Nomor : B.070/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Julkifli, SE**
NIP : 19750201 199803 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa Persediaan barang yang kadaluarsa dan rusak per 31 Desember 2023 dan belum pernah dikeluarkan dari daftar persediaan yang di sertakan daftarnya yang berisi informasi nama barang yang rusak dan kadaluarsa, jumlah barang, tanggal barang, tanggal kadaluarsa dan dilakukan pemusnahan di tahun 2023 serta Berita Acara Pemusnahannya **tidak ada.**

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bangun Darat, 12 Januari 2023

Camat,

JULKIFLI, SE
Pembina

NIP. 19750201 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

KEDANG IPIL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Nama

Jabatan

Instansi

Alamat

: JULKIFLI, SE

: Pengguna Anggaran

: Kecamatan Kota Bangun Darat

: Kota Bangun
2.

Nama

Jabatan

Instansi

Alamat

: SOFIANSYAH, SE

: Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan

: Kecamatan Kota Bangun Darat

: Kota Bangun

Berkenaan dengan tidak terealisasinya dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada Tahun 2023, maka saya selaku Kepala OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD menyatakan bahwa terdapat Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 103.696.467,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	:	Rp	-
2.	Utang Pendapatan Diterima Dimuka	:	Rp	-
3.	Utang Belanja	:	Rp	103.696.467,00
	a. Utang Belanja Pegawai		Rp	97.444.694,00
	b. Utang Belanja Barang dan Jasa		Rp	6.251.773,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya		Rp	-
	a. Utang Kelebihan Pembayaran PAD		Rp	-
	b. Utang Pengadaan Aset Tetap		Rp	-
JUMLAH			Rp	103.696.467,00

Terhadap kewajiban jangka pendek tersebut telah dilakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan dan/atau kebenaran data kewajiban jangka pendek tersebut, kami bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

JULKIFLI, SE

NIP. 10750201 199803 1 004

Pengguna Anggaran,

PPK

SOFIANSYAH, SE

NIP. 19761220 200701 1 014

REKAPITULASI NILAI UTANG PER 31 DESEMBER 2023
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

NO	URAIAN	SALDO AWAL (NILAI UTANG AUDITED 2022)	MUTASI KURANG (REALISASI PEMBAYARAN UTANG TA. 2022)	SISA UTANG TA. 2022	SISA UTANG TA. 2022 YANG MASIH DITAGIHKAN DI TA. 2023	MUTASI TAMBAH (UTANG TA. 2023)	JUMLAH
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	-
2	Utang Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
3	Utang Belanja	-	-	-	-	103.696.467,00	103.696.467,00
	a. Utang Belanja Pegawai	-	-	-		97.444.694,00	
	b. Utang Belanja Barang dan Jasa	-	-	-		6.251.773,00	
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-	-
	a. Utang Kelebihan Pembayaran PAD						
	b. Utang Pengadaan Aset Tetap						
		-	-	-	-	103.696.467,00	103.696.467,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REGISTER SURAT TANDA SETOR (STS)

Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

No	Tanggal	No STS	Kode Jenis Setoran		Uraian	Nilai STS (Rp)	Keterangan
1	27/12/2023	0001/STS/KOBADAR/2023	PUP1	UP	Pengembalian atas Atas Sisa Uang Persediaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023.	1.798.725,00	
2	29/12/2023	0002/STS/KOBADAR/2023	BLB1	LS	Pengembalian Atas Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2023	72.000.000,00	
Jumlah						73.798.725,00	

Kota Bangun Darat, 11 Januari 2024

Pengguna Anggaran,



JULIYELI, SE

NIP. 19750201 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

SURAT TANDA SETORAN
(STS)

Wajib Setor/Wajib
Bayar/Bendahara
Sebagai Bukti Setoran

1. Nomor STS : 0001/STS/KOBADAR/2023
2. Bank Penerima : Bank Kaltimtara Cabang Kota Bangun III
3. Nama / Nomor Rekening Bank : Rek.Penerimaan Daerah Kukar Nomor: 0 0 4 1 3 0 0 0 1 9
4. Penytor : AL HOFID NUR
5. NO. SKPD/KODE SETORAN/TAHUN :
KODE SKPD: 4.11.16.01 KODE JENIS SETORAN PUP1 TAHUN KEGIATAN: 2023
6. Harap Menerima Uang Sebesar : Rp 1.798.725,00
(dengan huruf) : /// Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah///
7. Program : -
8. Kegiatan : -
9. Keterangan : Pengembalian Atas Sisa Uang Persediaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023

10.	NO	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA	JUMLAH
	1.			Rp 1.798.725,00
			JUMLAH	Rp 1.798.725,00

Mengetahui, Pegguna Anggaran JULKIFLI, SE NIP. 19750201 199803 1 004	Penytor AL HOFID NUR NIP. 19720701 200701 1 023	Kota Bangun Darat, 27 Desember 2023 Yang Menerima ZULKIFLI HM
---	--	---

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	SURAT TANDA SETORAN (STS)	Wajib Setor/Wajib Bayar/Bendahara Sebagai Bukti Setoran																																					
<table><tr><td>1. Nomor STS</td><td>: 0002/ST S/KOBADAR/2023</td></tr><tr><td>2. Bank Penerima</td><td>: Bank Kaltimara Cabang Kota Bangun III</td></tr><tr><td>3. Nama / Nomor Rekening Bank</td><td>: Rek.Penerimaan Daerah Kukar Nomor: <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table></td></tr><tr><td>4. Penyetor</td><td>: AL HOFID NUR</td></tr><tr><td>5. NO. SKPD/KODE SETORAN/TAHUN</td><td>: <table><tr><td>KODE SKPD:</td><td>KODE JENIS SETORAN</td><td>TAHUN KEGIATAN:</td></tr><tr><td><table border="1"><tr><td>4.11.16.01</td></tr></table></td><td><table border="1"><tr><td>BLB 1</td></tr></table></td><td><table border="1"><tr><td>2023</td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td>6. Harap Menerima Uang Sebesar (dengan huruf)</td><td>: Rp 72.000.000,00 : <i>/// Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah ///</i></td></tr><tr><td>7. Program</td><td>: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</td></tr><tr><td>8. Kegiatan</td><td>: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</td></tr><tr><td>9. Keterangan</td><td>: Pengembalian Atas Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2023</td></tr></table>			1. Nomor STS	: 0002/ST S/KOBADAR/2023	2. Bank Penerima	: Bank Kaltimara Cabang Kota Bangun III	3. Nama / Nomor Rekening Bank	: Rek.Penerimaan Daerah Kukar Nomor: <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>	0	0	4	1	3	0	0	0	1	9	4. Penyetor	: AL HOFID NUR	5. NO. SKPD/KODE SETORAN/TAHUN	: <table><tr><td>KODE SKPD:</td><td>KODE JENIS SETORAN</td><td>TAHUN KEGIATAN:</td></tr><tr><td><table border="1"><tr><td>4.11.16.01</td></tr></table></td><td><table border="1"><tr><td>BLB 1</td></tr></table></td><td><table border="1"><tr><td>2023</td></tr></table></td></tr></table>	KODE SKPD:	KODE JENIS SETORAN	TAHUN KEGIATAN:	<table border="1"><tr><td>4.11.16.01</td></tr></table>	4.11.16.01	<table border="1"><tr><td>BLB 1</td></tr></table>	BLB 1	<table border="1"><tr><td>2023</td></tr></table>	2023	6. Harap Menerima Uang Sebesar (dengan huruf)	: Rp 72.000.000,00 : <i>/// Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah ///</i>	7. Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8. Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9. Keterangan	: Pengembalian Atas Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2023
1. Nomor STS	: 0002/ST S/KOBADAR/2023																																						
2. Bank Penerima	: Bank Kaltimara Cabang Kota Bangun III																																						
3. Nama / Nomor Rekening Bank	: Rek.Penerimaan Daerah Kukar Nomor: <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>	0	0	4	1	3	0	0	0	1	9																												
0	0	4	1	3	0	0	0	1	9																														
4. Penyetor	: AL HOFID NUR																																						
5. NO. SKPD/KODE SETORAN/TAHUN	: <table><tr><td>KODE SKPD:</td><td>KODE JENIS SETORAN</td><td>TAHUN KEGIATAN:</td></tr><tr><td><table border="1"><tr><td>4.11.16.01</td></tr></table></td><td><table border="1"><tr><td>BLB 1</td></tr></table></td><td><table border="1"><tr><td>2023</td></tr></table></td></tr></table>	KODE SKPD:	KODE JENIS SETORAN	TAHUN KEGIATAN:	<table border="1"><tr><td>4.11.16.01</td></tr></table>	4.11.16.01	<table border="1"><tr><td>BLB 1</td></tr></table>	BLB 1	<table border="1"><tr><td>2023</td></tr></table>	2023																													
KODE SKPD:	KODE JENIS SETORAN	TAHUN KEGIATAN:																																					
<table border="1"><tr><td>4.11.16.01</td></tr></table>	4.11.16.01	<table border="1"><tr><td>BLB 1</td></tr></table>	BLB 1	<table border="1"><tr><td>2023</td></tr></table>	2023																																		
4.11.16.01																																							
BLB 1																																							
2023																																							
6. Harap Menerima Uang Sebesar (dengan huruf)	: Rp 72.000.000,00 : <i>/// Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah ///</i>																																						
7. Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																																						
8. Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																																						
9. Keterangan	: Pengembalian Atas Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2023																																						
<table><tr><td>10.</td><td><table><tr><th>NO</th><th>KODE PROG./KEG./REK.</th><th>URAIAN BELANJA</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>5.1.02.05.01.0001</td><td>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</td><td>Rp 72.000.000,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td>Rp 72.000.000,00</td></tr></table></td></tr></table>			10.	<table><tr><th>NO</th><th>KODE PROG./KEG./REK.</th><th>URAIAN BELANJA</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>5.1.02.05.01.0001</td><td>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</td><td>Rp 72.000.000,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td>Rp 72.000.000,00</td></tr></table>	NO	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA	JUMLAH	1.	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp 72.000.000,00													JUMLAH			Rp 72.000.000,00											
10.	<table><tr><th>NO</th><th>KODE PROG./KEG./REK.</th><th>URAIAN BELANJA</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>5.1.02.05.01.0001</td><td>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</td><td>Rp 72.000.000,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td>Rp 72.000.000,00</td></tr></table>	NO	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA	JUMLAH	1.	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp 72.000.000,00													JUMLAH			Rp 72.000.000,00														
NO	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA	JUMLAH																																				
1.	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp 72.000.000,00																																				
JUMLAH			Rp 72.000.000,00																																				
Mengetahui, Pengguna Anggaran  JULKIFLI, SE NIP. 19750201-199803-1-004	Penyetor  AL HOFID NUR NIP. 19720701 200701 1 023	Kota Bangun Darat, 29 Desember 2023 Yang Menerima  <u>Nur Rahmah Nida</u>																																					

Kota Bangun, 17 Januari 2024

Nomor Lampiran : 004/B-5/BPD-KKKOBAlII/I/2024
Lampiran : 1 Lembar

Kepada Yth.
Camat Kota Bangun Darat
Di –
Kota Bangun Darat

Perihal: Penyampaian Rekening Koran Per 31 Desember 2023

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Nomor : P.007/KOBDAR/PROGKEU/01/2024 Tgl 15 Januari 2024 Perihal : Penggunaan Bank Statement Atas Penggunaan Rekening SKPD Kantor Camat Kota Bangun Darat, bersama dengan ini kami sampaikan rekening koran/Bank Statement giro pemda An. KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT periode Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Rekening	Nama/Pemegang Rekening	No. Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Giro	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT	0041429097	Rp. 0,00

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
KANTOR CABANG TENGGARONG
KANTOR KAS KOTA BANGUN



ZULKIFLI HM
Pemimpin



Kepada Yth.

KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
JL PEMBANGUNAN RT 002
KUTAI KARTANEGARA

No. Rekening : 0041429097
Valuta : IDR
Periode : 01-10-2023 s/d 31-12-2023
Cabang : Cabang Tenggaraong
NWP : 507472454728000

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
30-09-2023	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
05-12-2023	20883/LS/2023	P00000286102	0,00	1.329.100.000,00	1.329.100.000,00
05-12-2023	20883/LS/2023	P00000286103	57.313.000,00	0,00	1.271.787.000,00
05-12-2023	20879/LS/2023	P00000286203	0,00	1.592.000.000,00	2.863.787.000,00
05-12-2023	20879/LS/2023	P00000286204	79.600.000,00	0,00	2.784.187.000,00
06-12-2023	21542/UP/2023	P00000287097	0,00	100.000.000,00	2.884.187.000,00
08-12-2023	XAAB464964/ALHOFID NUR	XAAB464964	2.670.766.000,00	0,00	213.421.000,00
12-12-2023	Uang Pembinaan ter double	MB1702364780SMW	0,00	6.650.000,00	220.071.000,00
13-12-2023	PB NUR AFNI	AJI.0301	0,00	2.850.000,00	222.921.000,00
13-12-2023	PB SITI NURHALISA/KEC KOB DAR	MITHA.36.01	0,00	3.800.000,00	226.721.000,00
14-12-2023	PB/ROSITA-KEC KOTA BANGUN DRT	RAHMI/0014	0,00	1.900.000,00	228.621.000,00
14-12-2023	SET BUSTAN A/PENG.DNA HDIAH MT	TOMY.54	0,00	4.750.000,00	233.371.000,00
14-12-2023	25189/GU/2023	P00000311001	0,00	97.002.000,00	330.373.000,00
15-12-2023	BIFI000009500625	231215372282	0,00	5.700.000,00	336.073.000,00
15-12-2023	25798/GU/2023	P00000314605	0,00	98.902.000,00	434.975.000,00
15-12-2023	XAAB464965/ALHOFID NUR	XAAB464965	87.301.800,00	0,00	347.673.200,00
15-12-2023	XAAB464966/ALHOFID NUR	XAAB464966	45.100.000,00	0,00	302.573.200,00
17-12-2023	BIFI0000027571841	231217361625	0,00	2.000.000,00	304.573.200,00
18-12-2023	PB M RAFFI/TRISNA D-KEC KOTA B	KINAN/0045	0,00	3.800.000,00	308.373.200,00
18-12-2023	PB M RAFFI/TRISNA D-KEC KOTA B	KINAN/0046	0,00	4.750.000,00	313.123.200,00
18-12-2023	XAAB464967/ALHOFID NUR	XAAB464967	9.700.200,00	0,00	303.423.000,00
18-12-2023	26348/GU/2023	P00000319673	0,00	99.102.000,00	402.525.000,00
20-12-2023	27745/GU/2023	P00000326176	0,00	99.556.000,00	502.081.000,00
20-12-2023	XAAB464968/ALHOFID NUR	XAAB464968	178.519.600,00	0,00	323.561.400,00
21-12-2023	PB ADJI NUR/KEC KOB DARAT	MITHA.02.01	0,00	6.650.000,00	330.211.400,00
21-12-2023	XAAB464969/ALHOFID NUR	XAAB464969	92.697.482,00	0,00	237.513.918,00
22-12-2023	SET KEC KOTA BANG DRT-SITI K	SLV.239	0,00	5.700.000,00	243.213.918,00
27-12-2023	29491/LS/2023	P00000348547	0,00	28.740.000,00	271.953.918,00
27-12-2023	29491/LS/2023	P00000348548	2.265.000,00	0,00	269.688.918,00
27-12-2023	29494/LS/2023	P00000348549	0,00	76.160.000,00	345.848.918,00
27-12-2023	29494/LS/2023	P00000348550	3.808.000,00	0,00	342.040.918,00
27-12-2023	29490/LS/2023	P00000349107	0,00	49.470.000,00	391.510.918,00
27-12-2023	XAAB464970/ALHOFID NUR	XAAB464970	226.590.725,00	0,00	164.920.193,00
28-12-2023	XAAB573072/ALHOFID NUR	XAAB573072	164.732.193,00	0,00	188.000,00
29-12-2023	XAAB573073/ALHOFID NUR	XAAB573073	188.000,00	0,00	0,00
29-12-2023	SALDO AKHIR		3.618.582.000,00	3.618.582.000,00	0,00

- Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setuju
- Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
- Bilamana terdapat perbedaan antara cetakan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah pembukuan Bank.
- Bank setiap saat berhak melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan pada Rekening Koran.

Samarinda, 17 Januari 2024


NADILLA PUTRI RAHMADANI
bankaltimara



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini senin tanggal dua November dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULKIFLI, SE
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, kami melakukan pemeriksaan Setempat pada :

Nama : ALHOFID NUR
Jabatan : Bendahara pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Kecamatan Kota Bangun

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui Kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas	=	Rp	-
b. Uang Logam	=	Rp	-
c. SP2D dan alat pembayaran yang belum dicairkan	=	Rp	-
d. Saldo Bank	=	Rp	-
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	=	Rp	-
Jumlah		Rp	-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Regester dan lain sebagainya berjumlah	=	Rp	-
Perbedaan positif/negatif antara Saldo Kas dan Saldo Buku	=	Rp	-
Penjelasan perbedaan positi/negatif	=	nihil	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


JULKIFLI, SE
NIP. 197502011998031004

Bendahara Pengeluaran


ALHOFID NUR
NIP. 197207012007011023



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Kamis, Tanggal 30 Bulan November Tahun 2023, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JULKIFLI, SE
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, kami melakukan pemeriksaan Setempat pada :

Nama : ALHOFID NUR
Jabatan : Bendahara pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Kecamatan Kota Bangun

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui Kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas	=	Rp	-
b. Uang Logam	=	Rp	-
c. SP2D dan alat pembayaran yang belum dicairkan	=	Rp	-
d. Saldo Bank	=	Rp	-
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	=	Rp	-
Jumlah		Rp	-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Regester dan lain sebagainya berjumlah	=	Rp	-
Perbedaan positif/negatif antara Saldo Kas dan Saldo Buku	=	Rp	-
Penjelasan perbedaan positi/negatif	=	nihil	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

JULKIFLI SE
NIP. 197502011998031004

Bendahara Pengeluaran

ALHOFID NUR
NIP. 197207012007011023



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu, Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JULKIFLI, SE
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, kami melakukan pemeriksaan
Setempat pada :

Nama : ALHOFID NUR
Jabatan : Bendahara pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November 2023
ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui
Kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas	=	Rp	-
b. Uang Logam	=	Rp	-
c. SP2D dan alat pembayaran yang belum dicairkan	=	Rp	-
d. Saldo Bank	=	Rp	-
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	=	Rp	-
Jumlah		Rp	-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Regester dan lain sebagainya berjumlah	=	Rp	-
Perbedaan positif/negatif antara Saldo Kas dan Saldo Buku	=	Rp	-
Penjelasan perbedaan positi/negatif	=		-

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
JULKIFLI, SE
NIP. 197502011998031004

Bendahara Pengeluaran
ALHOFID NUR
NIP. 197207012007011023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

Pada hari ini senin tanggal dua November dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALHOFID NUR
NIP : 197207012007011023
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran

1. Penerimaan / Realisasi SP2D			Rp	-
1.	Uang Persediaan (UP)	: Rp	-	
2.	Ganti Uang (GU)	: Rp	-	
3.	Tambah Uang (TU)	: Rp	-	
4.	Belanja Langsung (LS)	: Rp	-	
Jumlah		Rp	-	
2. Pengeluaran / Realisasi Belanja			Rp	-
1.	Uang Persediaan (UP)	: Rp	-	
2.	Ganti Uang (GU)	: Rp	-	
3.	Tambah Uang (TU)	: Rp	-	
4.	Belanja Langsung (LS)	: Rp	-	
Jumlah		Rp	-	
Sisa UYHD			Rp	-
3. Setoran (STS)			Rp	-
1.	Ganti Uang (GU)	: Rp	-	
2.	Tambah Uang (TU)	: Rp	-	
3.	Belanja Langsung (LS)	: Rp	-	
4.	Uang Persediaan (UP)	: Rp	-	
Jumlah		Rp	-	
4. Saldo Kas Di Bendahara			Rp	-
1	- Saldo Buku Kas	Rp	-	
2	- Panjar PPTK/SPJ belum di GU	Rp	-	
Selisih			Rp	-
Penjelasan perbedaan positif/negatif			Rp	-

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran
JULI ELI SE
NIP. 197502011998031004

Bendahara Pengeluaran
ALHOFID NUR
NIP. 197207012007011023



BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

Pada hari ini Kamis, Tanggal 30 Bulan November Tahun 2023, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALHOFID NUR
NIP : 197207012007011023
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran

1. Penerimaan / Realisasi SP2D			Rp	5.937.079.476
1.	Uang Persediaan (UP)	: Rp	-	
2.	Ganti Uang (GU)	: Rp	-	
3.	Tambah Uang (TU)	: Rp	-	
4.	Belanja Langsung (LS)	: Rp	5.937.079.476	
Jumlah		Rp	5.937.079.476	
2. Pengeluaran / Realisasi Belanja			Rp	5.937.079.476
1.	Uang Persediaan (UP)	: Rp	-	
2.	Ganti Uang (GU)	: Rp	-	
3.	Tambah Uang (TU)	: Rp	-	
4.	Belanja Langsung (LS)	: Rp	5.937.079.476	
Jumlah		Rp	5.937.079.476	
Sisa UYHD			Rp	-
3. Setoran (STS)			Rp	-
1.	Ganti Uang (GU)	: Rp	-	
2.	Tambah Uang (TU)	: Rp	-	
3.	Belanja Langsung (LS)	: Rp	-	
4.	Uang Persediaan (UP)	: Rp	-	
Jumlah		Rp	-	
4. Saldo Kas Di Bendahara			Rp	-
1	- Saldo Buku Kas	Rp	-	
2	- Panjar PPTK/SPJ belum di GU	Rp	-	
Selisih			Rp	-
Penjelasan perbedaan positif/negatif			Rp	-

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan
Pengguna Anggaran
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
JULKIELI SE
NIP. 197502051998031004

Bendahara Pengeluaran
ALHOFID NUR
NIP. 197207012007011023



BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

Pada hari ini Minggu, Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALHOFID NUR
NIP : 197207012007011000
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran

1. Penerimaan / Realisasi SP2D				Rp	20.672.059.996
1.	Uang Persediaan (UP)	:	Rp	100.000.000	
2.	Ganti Uang (GU)	:	Rp	492.763.275	
3.	Tambah Uang (TU)	:	Rp	-	
4.	Belanja Langsung (LS)	:	Rp	20.079.296.721	
Jumlah			Rp	20.672.059.996	
2. Pengeluaran / Realisasi Belanja				Rp	20.672.059.996
1.	Uang Persediaan (UP)	:	Rp	100.000.000	
2.	Ganti Uang (GU)	:	Rp	492.763.275	
3.	Tambah Uang (TU)	:	Rp	-	
4.	Belanja Langsung (LS)	:	Rp	20.079.296.721	
Jumlah			Rp	20.672.059.996	
Sisa UYHD				Rp	-
3. Setoran (STS)				Rp	73.798.725,00
1.	Ganti Uang (GU)	:	Rp	-	
2.	Tambah Uang (TU)	:	Rp	-	
3.	Belanja Langsung (LS)	:	Rp	72.000.000,00	
4.	Uang Persediaan (UP)	:	Rp	1.798.725,00	
Jumlah			Rp	73.798.725,00	
4. Saldo Kas Di Bendahara				Rp	-
1	- Saldo Buku Kas		Rp	-	
2	- Panjar PPTK/SPJ belum di GU		Rp	-	
Selisih			Rp	-	
Penjelasan perbedaan positif/negatif				Rp	-

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

JULKIEL SE
NIP. 197502011998031004

Bendahara Pengeluaran

ALHOFID NUR
NIP. 197207012007011023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA

TENTANG

REKONSILIASI REKENING TITIPAN PAJAK
PADA OPD KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini telah dilakukan rekonsiliasi saldo buku pajak dan saldo rekening koran titipan pajak bulan antara Buku Pajak dan Saldo Rekening Koran Titipan Pajak sebagaimana rincian berikut :

NO	Uraian Jenis Pajak	Saldo Buku Pembantu Pajak	Saldo Rekening Titipan Pajak	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 22	-	-	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-
4	Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
5	Pajak Daerah (Katering)	-	-	-
6	Pajak Penghasilan Pasal 4	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Dari tabel diatas, ada/tidak ada^{*)} selisih antara saldo buku pajak dan saldo rekening titipan pajak yang disebabkan oleh:

- 1. NIHIL
- 2.
-

Sebagai data pendukung berita acara terlampir rekening koran titipan pajak.

NIHIL

NIHIL

Pejabat Penatausahaan Keuangan


SOFIANSYAH, SE
NIP. 197612282007011014

Bendahara Pengeluaran


ALFOFID NUR
NIP. 197207012007011023


Mengerahi
Kepala OPD Kantor Camat Kota Bangun Darat
JULKIFEL SE
NIP. 197502011998031004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535

Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA

TENTANG

REKONSILIASI REKENING TITIPAN PAJAK
PADA OPD KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini Kamis, Tanggal 30 Bulan November Tahun 2023 telah dilakukan rekonsiliasi saldo buku pajak dan saldo rekening koran titipan pajak bulan November Tahun 2023 antara Buku Pajak dan Saldo Rekening Koran Titipan Pajak sebagaimana rincian berikut :

NO	Uraian Jenis Pajak	Saldo Buku Pembantu Pajak	Saldo Rekening Titipan Pajak	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 22	-	-	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-
4	Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
5	Pajak Daerah (Katering)	-	-	-
6	Pajak Penghasilan Pasal 4	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Dari tabel diatas, ada/tidak ada^{*)} selisih antara saldo buku pajak dan saldo rekening titipan pajak yang disebabkan oleh:

- 0
-

Sebagai data pendukung berita acara terlampir rekening koran titipan pajak.

Demikian berita acara rekonsiliasi ini dibuat sebagai laporan bendahara pengeluaran OPD Bulan November Tahun 2023

Kota Bangun, 30 November 2023

Pejabat Penatausahaan Keuangan

SOFIANSYAH, SE
NIP. 197612282007011014

Bendahara Pengeluaran


ALMOFID NUR
NIP. 197207012007011023

Mengesahkan
Kepala OPD Kantor Camat Kota Bangun Darat

JULKIPRI, SE
NIP. 197502031998031004



BERITA ACARA

TENTANG

REKONSILIASI REKENING TITIPAN PAJAK
PADA OPD KECAMATAN KOTA BANGUN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini Minggu, Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023 telah dilakukan rekonsiliasi saldo buku pajak dan saldo rekening koran titipan pajak bulan Desember Tahun 2023 antara Buku Pajak dan Saldo Rekening Koran Titipan Pajak sebagaimana rincian berikut :

NO	Uraian Jenis Pajak	Saldo Buku Pembantu Pajak	Saldo Rekening Titipan Pajak	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pajak Penghasilan Pasal 21	2.295.000	2.295.000	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 22	170.270	170.270	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 23	2.100.000	2.100.000	-
4	Pajak Pertambahan Nilai	1.248.648	1.248.648	-
5	Pajak Daerah (Katering)	-	-	-
6	Pajak Penghasilan Pasal 4	34.322.925	34.322.925	-
	Jumlah	40.136.843	40.136.843	

Dari tabel diatas, ada/tidak ada^{*)} selisih antara saldo buku pajak dan saldo rekening titipan pajak yang disebabkan oleh:

- 1. 0
- 2.
-

Sebagai data pendukung berita acara terlampir rekening koran titipan pajak.

Demikian berita acara rekonsiliasi ini dibuat sebagai laporan bendahara pengeluaran OPD Bulan Desember Tahun 2023

Kota Bangun, 31 Desember 2023

Pejabat Penatausahaan Keuangan

SOFIANSYAH, SE
NIP. 197612282007011014

Mengetahui,
Kepala OPD Kantor Camat Kota Bangun
JULKIDILLI SE
NIP. 197802011998031004

Bendahara Pengeluaran

ALHOFID NUR
NIP. 197207012007011023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2023			Saldo Awal			0,00
04-12-2023	20878/LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiata MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	105.025.600,00		105.025.600,00
	20879/LS/2023		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Berupa Uang Pembinaan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional	1.592.000.000,00		1.697.025.600,00
	20880/LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	26.714.000,00		1.723.739.600,00
	20881/LS/2023		Belanja Makan Minum Jamuan Tamu Kegiata MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	713.628.700,00		2.437.368.300,00
	20882/LS/2023		Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	86.306.100,00		2.523.674.400,00
	20883/LS/2023		Pembayaran Honorarium Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.329.100.000,00		3.852.774.400,00
	20878/LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		105.025.600,00	3.747.748.800,00
	20879/LS/2023	5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		1.592.000.000,00	2.155.748.800,00
	20880/LS/2023	5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		26.714.000,00	2.129.034.800,00
	20881/LS/2023	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		713.628.700,00	1.415.406.100,00
	20882/LS/2023	5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		86.306.100,00	1.329.100.000,00
	20883/LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		7.560.000,00	1.321.540.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.040.000,00	1.319.500.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	119 /SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		303.000,00	1.752.000,00
	124 /SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		438.000,00	1.314.000,00
	125 /SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		1.314.000,00	0,00
Jumlah periode ini				20.612.196.839,00	20.612.196.839,00	
Jumlah sampai periode lalu				5.937.079.476,00	5.937.079.476,00	
Jumlah semua sampai periode ini				26.549.276.315,00	26.549.276.315,00	
Sisa Kas						0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
(rupiah)
terdiri dari:

- a. Tunai

Rp

0,00
- b. Bank

Rp

0,00
- c. Surat Berharga

Rp

0,00

PEMERINTAH KABUPATEN KANTARA

KECAMATAN KOTA BANGUN DARA

KANTOR LAKSANA PEMERINTAH KOTA BANGUN DARA

Mengetahui/Menyetujui:

PENGUNA ANGGARAN

JULKIFLI, SE

NIP.197502011998031004

Tenggarong, 02 Januari 2024

BENDAHARA PENGELUARAN



AL HOFID MUR

NIP 19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU BELANJA LS
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah periode ini	0,00	0,00
Jumlah sampai periode lalu	0,00	0,00
Jumlah semua sampai periode ini	0,00	0,00

Mengetujui/ Menyetujui:
PENGUNA ANGGARAN
KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT
JULKIFLI SE
NIP 197502011998031004

Tenggarong, 02 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN
AL HOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023

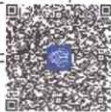




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU BELANJA LS
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 November 2023 s.d 30 November 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
17-11-2023	17460/LS/2023		Pengadaan Pakaian Kaos Harian) (Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Kutai Kartanegara) Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	93.840.000,00		93.840.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		93.840.000,00	0,00
	17462/LS/2023		Pengadaan Pakaian Muslim Kombinasi (Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Kutai Kartanegara) Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regio	255.500.000,00		255.500.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		255.500.000,00	0,00
	17465/LS/2023		Belanja Cetak Umbul-Umbul Plus Tiang Pipa Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	41.850.000,00		41.850.000,00
		5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		41.850.000,00	0,00
	17467/LS/2023		Pengadaan Pakaian Muslim Batik) (Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Kutai Kartanegara) Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional	368.667.000,00		368.667.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		368.667.000,00	0,00
	17470/LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	18.387.700,00		18.387.700,00
		5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		18.387.700,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	17472/LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150.115.000,00		150.115.000,00
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		150.115.000,00	0,00
	17474/LS/2023		Belanja Sewa Generator 80 KVA & Sewa Generator 60 KVA Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	174.650.000,00		174.650.000,00
		5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set		174.650.000,00	0,00
	17476/LS/2023		Belanja Sewa Alat Pendingin (Sewa Blower Dan Mistyfan) Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	46.360.000,00		46.360.000,00
		5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin		46.360.000,00	0,00
	17478/LS/2023		Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	392.700.000,00		392.700.000,00
		5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		392.700.000,00	0,00
	17480/LS/2023		Belanja Jasa Pertunjukan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	98.000.000,00		98.000.000,00
		5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		98.000.000,00	0,00
	17482/LS/2023		Belanja Jasa Paket Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	547.000.000,00		547.000.000,00
		5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		547.000.000,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
20-11-2023	17484/LS/2023		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Sewa Sound System Dan Lain-lain) Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	225.200.000,00		225.200.000,00
	17894/LS/2023	5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Pengadaan Tas Seminar (Souvenir Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara) Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	45.269.000,00	225.200.000,00	0,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		45.269.000,00	0,00
	17895/LS/2023		Pengadaan Trofi Lomba (Souvenir Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara) Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	130.872.000,00		130.872.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		130.872.000,00	0,00
	17896/LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Ke	18.812.500,00		18.812.500,00
		5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		7.350.000,00	11.462.500,00
		5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		11.462.500,00	0,00
			Perencanaan Lanjutan Semenisasi Rt. 11 Kota Bangun III, dli. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	87.579.000,00		87.579.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		87.579.000,00	0,00
27-11-2023	19074/LS/2023		Perencanaan Semenisasi Jalan Rt. 04 Desa Suka Bumi, Kab. Kutai Kartanegara Kel.Suka Bumi, dll.Â Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.983.080,00		47.983.080,00
	19075/LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		47.983.080,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	19077/LS/2023		Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 006 Desa Sukabumi Kecamatan Kota Bangun Darat, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	59.979.960,00		59.979.960,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		59.979.960,00	0,00
	19078/LS/2023		Perencanaan Lanjutan Semenisasi Jalan Rt.15 Desa Kota Bangun II, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	96.903.000,00		96.903.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		96.903.000,00	0,00
	19079/LS/2023		Perencanaan semenisasi / pengerasan Jalan RT 002 Desa Sumber Sari, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.982.620,00		63.982.620,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		63.982.620,00	0,00
	19081/LS/2023		Perencanaan Agregat / Pengerasan Jalan RT .01 Desa Kedang Ipil, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.973.740,00		63.973.740,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		63.973.740,00	0,00
	19082/LS/2023		Perencanaan Lanjutan Semenisasi Jalan Rt.003 Desa Kota Bangun II, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	94.805.100,00		94.805.100,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		94.805.100,00	0,00
	19083/LS/2023		PENGADAAN WARLESS DAN SOUND SYSTEM KELOMPOK PENGAJIAN KOTA BANGUN DARAT, KAB KUTAI KARTANEGARA KEL.SELURUH DESA Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	145.875.000,00		145.875.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		145.875.000,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	19084/LS/2023		Perencanaan Semenisasi Jalan Rt 02 Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Darat, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.973.740,00		63.973.740,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		63.973.740,00	0,00
	19085/LS/2023		PENGADAAN BAJU MUSLIM KELOMPOK PENGAJIAN KOTA BANGUN DARAT, KAB KUTAI KARTANEGARA KEL.SELURUH DESA Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	147.136.000,00		147.136.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		147.136.000,00	0,00
	19086/LS/2023		Perencanaan Pemasangan Turap dan Timbunan Jalan RT. 05 Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.990.850,00		47.990.850,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		47.990.850,00	0,00
	19087/LS/2023		Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Kota Bangun Rt.07 Dusun Sidomulyo Desa Sari Nadi, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.973.740,00		63.973.740,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		63.973.740,00	0,00
	19088/LS/2023		PENGADAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA (KOB DAR SP1 S/D SP4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.750.000,00		21.750.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		21.750.000,00	0,00
	19089/LS/2023		Perencanaan Semenisasi Jalan Nangka 2 Rt. 02 Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.990.850,00		47.990.850,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		47.990.850,00	0,00



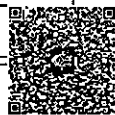
Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	19091/LS/2023		BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH (Pakaian Miskat HKG PKK) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.000.000,00		42.000.000,00
	19094/LS/2023	5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah		42.000.000,00	0,00
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan Komputer) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.534.500,00		65.534.500,00
		5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		10.164.500,00	55.370.000,00
		5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		33.070.000,00	22.300.000,00
		5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		22.300.000,00	0,00
	19096/LS/2023		PENGADAAN MCK UNTUK 5 DESA (Tandon 1200 Liter Pesut Premium & Tangki Septic Tank Bio 1000 Liter) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	146.850.000,00		146.850.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		146.850.000,00	0,00
	19099/LS/2023		Perencanaan Pembangunan Kantor Sekretariat Karang Taruna Desa Kota Bangun III, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	87.190.500,00		87.190.500,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		87.190.500,00	0,00
	19100/LS/2023		Perencanaan Normalisasi Parit Persawahan Desa Sumber Sari Kcc. Kota Bangun Darat, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	55.993.506,00		55.993.506,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		55.993.506,00	0,00
	19101/LS/2023		Perencanaan Normalisasi Anak Sungai Kandung Raya Desa Kedang Ipil Kota Bangun Darat, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.973.740,00		63.973.740,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		63.973.740,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	19102/LS/2023		Perencanaan Peningkatan Jalan Rt 009 Desa Sarinadi, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.973.740,00		63.973.740,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		63.973.740,00	0,00
	19103/LS/2023		Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Kota Bangun Desa Sukabumi RT 03, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	61.976.850,00		61.976.850,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		61.976.850,00	0,00
	19104/LS/2023		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Ulin Perumahan Dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter) RT.3 Desa Benua Baru, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.973.740,00		63.973.740,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		63.973.740,00	0,00
	19105/LS/2023		Perencanaan Semenisasi Jl. Petinggi Singkik RT. 04, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.990.850,00		47.990.850,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		47.990.850,00	0,00
	19106/LS/2023		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Rt.09 Dan Rt.010 Desa Sumber Sari Kec.Kota Bangun Darat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.991.960,00		47.991.960,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		47.991.960,00	0,00
	19107/LS/2023		Perencanaan Semenisasi Jalan Pemukiman Rt.04 Desa Kota Bangun I, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.982.620,00		63.982.620,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		63.982.620,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
30-11-2023	19108/LS/2023		Perencanaan Pembangunan Pagar Beton Kuburan Muslimin Kota Bangun 1, dll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	31.984.650,00		31.984.650,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		31.984.650,00	0,00
	20075/LS/2023		BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER (ACER TRAVELMATE P214 CORE I5) Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00		30.000.000,00
		5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		30.000.000,00	0,00
	20076/LS/2023		BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG (RUSH 1.5 S A/T GR SPORT & RUSH 1.5 S M/T GR SPORT) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	553.300.000,00		553.300.000,00
		5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang		553.300.000,00	0,00
	20077/LS/2023		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.332.000,00		49.332.000,00
		5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		49.332.000,00	0,00
	20078/LS/2023		BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG DAIHATSU GRAN MAX PICKUP 1.5 AC PS MC Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	153.000.000,00		153.000.000,00
		5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		153.000.000,00	0,00
	20079/LS/2023		BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER (Acer TravelMate P214 (52) & MyPC One Pro J5 (8S2) MyPC) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	261.000.000,00		261.000.000,00
		5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		261.000.000,00	0,00
	20080/LS/2023		BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA (SEPEDA MOTOR CRF150L) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.310.940,00		362.310.940,00
		5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua		362.310.940,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	20081/LS/2023		BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER (Epson DS-570W-II DS-501bt-35PPM-oneP-Wifi) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.600.000,00		23.600.000,00
		5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		23.600.000,00	0,00

Jumlah periode ini	0,00	0,00
Jumlah sampai periode lalu	5.937.079.476,00	5.937.079.476,00
Jumlah semua sampai periode ini	5.937.079.476,00	5.937.079.476,00

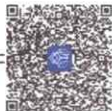


Tenggarong, 04 Desember 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

AL HOFID NUR

NIP 19720701 200701 1 023





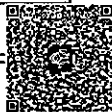
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU BELANJA LS
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
30-11-2023			Saldo Awal			0,00
04-12-2023	20878/LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiata MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	105.025.600,00		105.025.600,00
	20879/LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		105.025.600,00	0,00
			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Berupa Uang Pembinaan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional	1.592.000.000,00		1.592.000.000,00
	20880/LS/2023	5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		1.592.000.000,00	0,00
			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	26.714.000,00		26.714.000,00
	20881/LS/2023	5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		26.714.000,00	0,00
			Belanja Makan Minum Jamuan Tamu Kegiata MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	713.628.700,00		713.628.700,00
	20882/LS/2023	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		713.628.700,00	0,00
			Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	86.306.100,00		86.306.100,00
		5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		86.306.100,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
08-12-2023	20883/LS/2023		Pembayaran Honorarium Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.329.100.000,00		1.329.100.000,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		7.560.000,00	1.321.540.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.040.000,00	1.319.500.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		7.560.000,00	1.311.940.000,00
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		41.800.000,00	1.270.140.000,00
		5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		693.140.000,00	577.000.000,00
		5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		577.000.000,00	0,00
			BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA TEMPAT SAMPAH BESI 3 WARNA SUB. KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	108.400.000,00		108.400.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		108.400.000,00	0,00
			BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BEUPA BARANG FASILITASI PENGOLAAN SAMPAH SUB. KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	16.840.200,00		16.840.200,00
14-12-2023	25191/LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		16.840.200,00	0,00
			PEMBANGUNAN JALAN KECAMATAN KOTA BANGUN RT.01 DESA WONOSARI Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.310.074,00		171.310.074,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.310.074,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	25192/LS/2023		SEMENISASI JALAN NANGKA 2 RT. 02 DESA WONOSARI KECAMATAN KOTA BANGUN Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.310.074,00		171.310.074,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.310.074,00	0,00
	25194/LS/2023		LANJUTAN SEMENISASI JL. PETINGGI SEBA RT. 06 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	25196/LS/2023		LANJUTAN SEMENISASI JL. M AMIN RT. 07 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	170.829.266,00		170.829.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		170.829.266,00	0,00
	25197/LS/2023		PEMASANGAN TURAP DAN TIMBUNAN JALAN RT. 05 DESA WONOSARI KECAMATAN KOTA BANGUN Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.310.024,00		171.310.024,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.310.024,00	0,00
	25199/LS/2023		LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT 007 DUSUN HIKMAH DESA SUKA BUMI Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	170.860.057,00		170.860.057,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		170.860.057,00	0,00
	25201/LS/2023		SEMENISASI JL. KH DEWANTARA RT.07 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uralan	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	25202/LS/2023		PENGERASAN JALAN BRENGIT, KAB. KUTAI KARTANEGARA KEL.SARI NADI Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.245.716,00		171.245.716,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.245.716,00	0,00
	25203/LS/2023		PEMBANGUNAN JALAN KECAMATAN KOTA BANGUN RT.09 DUSUN SIDOMULYO DESA SARI NADI KEC. KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.137.557,00		171.137.557,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.137.557,00	0,00
	25204/LS/2023		PENGADAAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR BERUPA PERLENGKAPAN LOMBA SUB. KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL	17.450.000,00		17.450.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		17.450.000,00	0,00
	25205/LS/2023		BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PAPAN NAMA KAFILAH MTQ 20 KECAMATAN SUB. KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGI	15.980.000,00		15.980.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		15.980.000,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	25206/LS/2023		BELANJA JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI BERUPA DOKUMENTASI KEGIATAN MTQ SUB. KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	17.500.000,00		17.500.000,00
		5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		17.500.000,00	0,00
	25208/LS/2023		SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL BERUPA SEWA MOBIL SAMPAH SUB. KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	25.200.000,00		25.200.000,00
		5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		25.200.000,00	0,00
	25209/LS/2023		BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS DAN BAHAN KOMPUTER KEGIATAN MTQ KABUPATEN SUB. KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DA	22.875.000,00		22.875.000,00
		5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		15.000.000,00	7.875.000,00
		5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		7.875.000,00	0,00
	25210/LS/2023		PENGADAAN ARMADA ANGKUTAN SAMPAH RODA 3 UNTUK 10 DESA (Perkasa 200cc Radiator Cargo Standard Plat Extra Power Gas Spring) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	496.000.000,00		496.000.000,00
		5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus		496.000.000,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
18-12-2023	26444/LS/2023		PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (LEBAR JALAN 4 METER) RT.09 DAN RT.010 DESA SUMBER SARI KEC.KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.155.962,00		171.155.962,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.155.962,00	0,00
	26445/LS/2023		PENINGKATAN/ SEMENISASI JALAN PEPAYA 2 DESA WONOSARI RT 02 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	26446/LS/2023		PENINGKATAN/ SEMENISASI JALAN KUBURAN DESA WONOSARI RT 01 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	170.829.266,00		170.829.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		170.829.266,00	0,00
	26447/LS/2023		SEMENISASI/GANG RT.14 DESA SARINADI KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	26448/LS/2023		LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT.019 DESA KOTA BANGUN II Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.234.679,00		171.234.679,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.234.679,00	0,00
	26449/LS/2023		LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT.010 DESA KOTA BANGUN II Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.235.615,00		171.235.615,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.235.615,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	26450/LS/2023		PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (LEBAR JALAN 4 METER) DESA KOTA BANGUN II RT.016 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.245.779,00		171.245.779,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.245.779,00	0,00
	26451/LS/2023		PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN DESA RT.16 DESA KOTA BANGUN II Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	127.664.466,00		127.664.466,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		127.664.466,00	0,00
	26452/LS/2023		LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT.15 DESA. KOTA BANGUN 2 KEC. KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.211.000,00		171.211.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.211.000,00	0,00
	26453/LS/2023		SEMENISASI JALAN RT. 03 DESA KOTA BANGUN II KECAMATAN KOTA BANGUN Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.269.521,00		171.269.521,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.269.521,00	0,00
	26454/LS/2023		PENINGKATAN BADAN/AGREGAT JALAN RT 2 DESA KOTA BANGUN 3, KAB KUTAI KARTANEGARA KELKOTA BANGUN III Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.200.000,00		171.200.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.200.000,00	0,00
	26455/LS/2023		NORMALISASI PARIT SAWAH KEDANG JADI RT. 19 DESA KOTA BANGUN II Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.230.229,00		171.230.229,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.230.229,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	26456/LS/2023		NORMALISASI ANAK SUNGAI MERAH DI DESA KOTA BANGUN2 KOTA BANGUN DARAT, KAB KUTAI KARTANEGARA KEL.KOTA BANGUN 2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	127.500.000,00		127.500.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		127.500.000,00	0,00
	26457/LS/2023		SEMENISASI JALAN DESA RT 10 DESA KOTA BANGUN III Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.201.379,00		171.201.379,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.201.379,00	0,00
	26458/LS/2023		PENGURUGAN DAN PERATAAN HALAMAN SEKOLAH SDN 026 KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	84.053.099,00		84.053.099,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		84.053.099,00	0,00
	26460/LS/2023		LANJUTAN PERKERASAN JALAN USAHA TANI KOPTAN BUMI JAYA RT. 03 DESA SUMBER SARI Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.190.002,00		171.190.002,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.190.002,00	0,00
	26463/LS/2023		SEMENISASI JALAN PEMUKIMAN RT.11 DESA KOTA BANGUN I Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.184.669,00		171.184.669,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.184.669,00	0,00
	26465/LS/2023		PEMBANGUNAN SALURAN GORONG-GORONG KECAMATAN KOTA BANGUN DESA KOTA BANGUN I, RT 12 DUSUN TEGAL ARUM Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.107.025,00		171.107.025,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.107.025,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	26468/LS/2023		PEMBANGUNAN SALURAN GORONG-GORONG KECAMATAN KOTA BANGUN DESA KOTA BANGUN I, RT 01 DUSUN TAMBAH REJO Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.156.489,00		171.156.489,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.156.489,00	0,00
	26470/LS/2023		PENINGKATAN JLN USAHA TANI KARYA JAYA (AGREGAT) DESA SEDULANG Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.156.916,00		171.156.916,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.156.916,00	0,00
	26471/LS/2023		SEMENISASI JALAN RT. 04 DESA SUKA BUMI, KAB. KUTAI KARTANEGARA KEL.SUKA BUMI Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	26472/LS/2023		PENINGKATAN/PEMELIHARAAN JALAN DESA SUKA BUMI, KECAMATAN KOTA BANGUN, KAB. KUTAI KARTANEGARA Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	187.897.495,00		187.897.495,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		187.897.495,00	0,00
	26473/LS/2023		PEMBANGUNAN JALAN KECAMATAN KOTA BANGUN DESA SUKABUMI RT 03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.112.311,00		171.112.311,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.112.311,00	0,00
	26474/LS/2023		PENINGKATAN JALAN DESA BENUA BARU Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	26475/LS/2023		NORMALISASI ANAK SUNGAI KANDUANG RAYA DESA KEDANG IPIL KOTA BANGUN DARAT, KAB KUTAI KARTANEGARA KELKEDANG IPIL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.157.457,00		171.157.457,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.157.457,00	0,00
	26476/LS/2023		SEMENISASI JL. PETINGGI SINGKIK RT. 04 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	26477/LS/2023		SEMENISASI JALAN MENUJU TK TBT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	26478/LS/2023		AGREGAT / Pengerasan JALAN RT .01 DESA KEDANG IPIL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.055.236,00		171.055.236,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.055.236,00	0,00
	26479/LS/2023		PENINGKATAN JALAN DESA KEDANG IPIL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.400,00		171.162.400,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.400,00	0,00
	26480/LS/2023		PENINGKATAN PARIT JALAN POROS TEMBUS KE BLOK A DESA KOTA BANGUN III Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	84.027.715,00		84.027.715,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		84.027.715,00	0,00
	26481/LS/2023		PENURAPAN JALAN (BETON/PASANGAN BATU) DESA KOTA BANGUN III RT 4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.215.054,00		171.215.054,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.215.054,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
19-12-2023	26482/LS/2023		SEMENISASI JALAN DESA RT 2 DESA KOTA BANGUN III Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.228.098,00		171.228.098,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.228.098,00	0,00
	26483/LS/2023		NORMALISASI PARIT PERSAWAHAN DESA SUMBER SARI KEC. KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.100.010,00		171.100.010,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.100.010,00	0,00
	26484/LS/2023		PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (LEBAR JALAN 4 METER) DESA SUMBER SARI RT 003 KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.155.962,00		171.155.962,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.155.962,00	0,00
	27318/LS/2023		BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) SUB. KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	65.775.000,00		65.775.000,00
		5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		65.775.000,00	0,00
	27320/LS/2023		BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) KEGIATAN LINMAS SUB. KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	46.375.000,00		46.375.000,00
		5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		46.375.000,00	0,00
21-12-2023	29490/LS/2023		Belanja Biaya Perjalanan dinas Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten dengan Jumlah 48 SPPD, Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasion	49.470.000,00		49.470.000,00
		5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		49.470.000,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uralan	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	29491/LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Bulanan Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sesuai daftar terlampir. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.740.000,00		28.740.000,00
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		28.740.000,00	0,00
	29492/LS/2023	5.1.2.01.01.0024 5.1.2.01.01.0025 5.1.2.01.01.0029	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS-COVER DAN COMPUTER Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.	46.144.740,00		46.144.740,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.119.876,00	41.024.864,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		22.785.000,00	18.239.864,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		18.239.864,00	0,00
	29493/LS/2023		BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (Pakaian Kaos Harian Kafilah) Sub. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasi	12.480.000,00		12.480.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		12.480.000,00	0,00
	29494/LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Biaya Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 112 Paket, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.	76.160.000,00		76.160.000,00
			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		76.160.000,00	0,00
	27-12-2023	5.1.2.01.01.0039	LANJUTAN SEMENISASI JALAN PETINGGI SAMEN RT. 09 DESA KEDANG IPIL KECAMATAN KOTA BANGUN Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	170.829.266,00		170.829.266,00
	31477/LS/2023		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		170.829.266,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31480/LS/2023		PEMBANGUNAN JALAN KECAMATAN KOTA BANGUN JALAN ANTAR DUSUN KANDUA RAYA DAN DUSUN KETAPANG DESA KEDANG IPIL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.400,00		171.162.400,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.400,00	0,00
	31483/LS/2023		PEMBANGUNAN JALAN KECAMATAN KOTA BANGUN JL. UMAR RT. 12 DUSUN KETAPANG DESA KEDANG IPIL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.534,00		171.162.534,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.534,00	0,00
	31496/LS/2023		DRAINASE JALAN LINGKUNGAN (BETON/PASANGAN BATU) JL.SARAWANA KATON RT.003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	170.929.540,00		170.929.540,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		170.929.540,00	0,00
	31499/LS/2023		PEMBUATAN SALURAN DRAINASE RT. 03 DESA BENUA BARU Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.209.962,00		171.209.962,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.209.962,00	0,00
	31503/LS/2023		SEMENISASI HALAMAN MASJID SABILUL MUTAQIN DESA BENUA BARU Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.087.468,00		171.087.468,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.087.468,00	0,00
	31507/LS/2023		SEMENISASI JLN SARAWANA KATON RT 03 DESA BENUA BARU Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31510/LS/2023		PEMBANGUNAN/PENINGKAT AN JEMBATAN ULIN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (LEBAR JALAN 4 METER) RT.3 DESA BENUA BARU Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.007.166,00		171.007.166,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.007.166,00	0,00
	31515/LS/2023		LANJUTAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI RT 006 DESA SUKABUMI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	127.487.839,00		127.487.839,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		127.487.839,00	0,00
	31527/LS/2023		PEMBANGUNAN JALAN KECAMATAN KOTA BANGUN DESA SUKABUMI RT 07 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	31535/LS/2023		SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT.007 DESA SUKABUMI KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	127.551.726,00		127.551.726,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		127.551.726,00	0,00
	31540/LS/2023		SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT.05 DESA SUKABUMI KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	31543/LS/2023		SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT.07 DESA SUKABUMI KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uralan	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31546/LS/2023		PENINGKATAN/PEMELIHARA AN JALAN KECAMATAN KOTA BANGUN DESA SEDULANG RT.001 DAN RT.002 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.136.846,00		171.136.846,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.136.846,00	0,00
	31549/LS/2023		SEMENISASI JALAN RT 02 DESA SEDULANG KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	31553/LS/2023		PENINGKATAN/PEMELIHARA AN JEMBATAN KECAMATAN KOTA BANGUN DESA SEDULANG RT.001 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.008.356,00		171.008.356,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.008.356,00	0,00
	31556/LS/2023		PEMBANGUNAN JALAN KECAMATAN KOTA BANGUN RT.07 DUSUN SIDOMULYO DESA SARI NADI, KEC. KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.137.557,00		171.137.557,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.137.557,00	0,00
	31820/LS/2023		SEMENISASI JALAN RT. 12 DESA KOTA BANGUN I KECAMATAN KOTA BANGUN Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.242.691,00		171.242.691,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.242.691,00	0,00
	31823/LS/2023		PENINGKATAN JALAN DESA KOTA BANGUN III Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.251.464,00		171.251.464,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.251.464,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31827/LS/2023		LANJUTAN SEMENISASI RT 11 DESA KOTA BANGUN III KEC KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	84.052.879,00		84.052.879,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		84.052.879,00	0,00
	31830/LS/2023		SEMENISASI JALAN MADIYA UTAMA DI KOTA BANGUN 2 DESA KOTA BANGUN 2 KAB. KUTAI KARTANEGARA Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.858.765,00		100.858.765,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		100.858.765,00	0,00
	31832/LS/2023		PEMBANGUNAN/PENINGKAT AN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (LEBAR JALAN 4 METER) DESA KOTA BANGUN II RT.006 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.254.636,00		171.254.636,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.254.636,00	0,00
	31834/LS/2023		LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT. 03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.269.521,00		171.269.521,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.269.521,00	0,00
	31837/LS/2023		SEMENISASI JALAN DESA KOTA BANGUN II Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.196.045,00		171.196.045,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.196.045,00	0,00
	31839/LS/2023		PENURAPAN JLN DESA RT. 20 DESA KOTA BANGUN II Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.208.818,00		171.208.818,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.208.818,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31840/LS/2023		PENURAPAN JALAN (BETON/PASANGAN BATU) DESA KOTA BANGUN III RT 14 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.223.062,00		171.223.062,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.223.062,00	0,00
	31842/LS/2023		PENINGKATAN JALAN RT 003 DESA KOTA BANGUN I Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.242.691,00		171.242.691,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.242.691,00	0,00
	32116/LS/2023		PEMBANGUNAN PAGAR BETON KUBURAN MUSLIMIN KOTA BANGUN 3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	160.376.800,00		160.376.800,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		160.376.800,00	0,00
	32122/LS/2023		PEMBANGUNAN PAGAR BETON KUBURAN MUSLIMIN KOTA BANGUN 1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	161.545.721,00		161.545.721,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		161.545.721,00	0,00
	32126/LS/2023		PEMBANGUNAN KANTOR SEKRETARIAT KARANG TARUNA DESA KOTA BANGUN III Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	170.847.792,00		170.847.792,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		170.847.792,00	0,00
	32130/LS/2023		SEMENISASI JALAN PEMUKIMAN RT.04 DESA KOTA BANGUN I Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.220.002,00		171.220.002,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.220.002,00	0,00
	32134/LS/2023		PENINGKATAN JALAN DESA KOTA BANGUN I Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.229.521,00		171.229.521,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.229.521,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32138/LS/2023		SEMENISASI / PENGERASAN JALAN RT 002 DESA SUMBER SARI Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.245.883,00		171.245.883,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.245.883,00	0,00
	32141/LS/2023		PERKERASAN JALAN DESA DESA SUMBER SARI RT. 009 KEC. KOTA BANGUN Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.184.000,00		171.184.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.184.000,00	0,00
	32144/LS/2023		PEMBANGUNAN TURAP KECAMATAN KOTA BANGUN JALAN POROS DESA WONOSARI KE DESA KEDANG IPIL KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.154.178,00		171.154.178,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.154.178,00	0,00
	32148/LS/2023		SEMENISASI JALAN GANG RT. 06 DESA SARI NADI Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	32151/LS/2023		SEMENISASI/GANG RT.07 DESA SARINADI KOTA BANGUN DARAT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	32153/LS/2023		PENINGKATAN JALAN RT 009 DESA SARINADI Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
28-12-2023	32155/LS/2023		PENINGKATAN JALAN DESA SARINADI Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.162.266,00		171.162.266,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.162.266,00	0,00
	32846/LS/2023		PENGAWASAN SEMENISASI JL. PETINGGI SINGKIK RT. 04,PENGAWASAN SEMENISASI JL. KH DEWANTARA RT.07,PENGAWASAN SEMENISASI JALANÂ MENUJUÂ TKÂ TBT Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.796.730,00		28.796.730,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		28.796.730,00	0,00
	32848/LS/2023		BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG (Sewa Mobil PickUp) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	59.340.000,00		59.340.000,00
		5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		59.340.000,00	0,00
	32849/LS/2023		PENGAWASAN SEMENISASI / Pengerasan Jalan RT 002 Desa Sumber Sari DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.399.340,00		38.399.340,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		38.399.340,00	0,00
	32850/LS/2023		PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR SEKRETARIAT KARANG TARUNA DESA KOTA BANGUN III DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52.641.750,00		52.641.750,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		52.641.750,00	0,00
	32851/LS/2023		PENGAWASAN SEMENISASI JALAN PEMUKIMAN RT.11 DESA KOTA BANGUN I DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.399.340,00		38.399.340,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		38.399.340,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32852/LS/2023		PENGAWASAN LANJUTAN SEMENISASI RT. 11 DESA KOTA BANGUN III KEC. KOTA BANGUN DARAT DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52.725.000,00		52.725.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		52.725.000,00	0,00
	32853/LS/2023		SEMENISASI JALAN DESA DESA SUMBER SARI RT. 012 KEC. KOTA BANGUN DARAT KAB. KUTAI KARTANEGARA Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.195.000,00		171.195.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.195.000,00	0,00
	32854/LS/2023		PENGAWASAN NORMALISASI PARIT PERSAWAHAN DESA SUMBER SARI KEC. KOTA BANGUN DARAT DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.777.500,00		28.777.500,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		28.777.500,00	0,00
	32855/LS/2023		PENGAWASAN AGREGAT / Pengerasan Jalan RT .01 DESA KEDANG IPIL DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.394.900,00		38.394.900,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		38.394.900,00	0,00
	32856/LS/2023		PENGAWASAN LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT.003 DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	57.442.500,00		57.442.500,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		57.442.500,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32857/LS/2023		PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR BETOM KUBURAN MUSLIMIN KOTA BANGUN 1,PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR BETOM KUBURAN MUSLIMIN KOTA BANGUN 3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19.191.900,00		19.191.900,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		19.191.900,00	0,00
	32858/LS/2023		SEMENISASI JALAN BLOK A DESA KOTA BANGUN III Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	127.683.264,00		127.683.264,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		127.683.264,00	0,00
	32859/LS/2023		Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan Kasi. PMD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,00		20.200.000,00
		5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		20.200.000,00	0,00
	32860/LS/2023		PENGAWASAN PEMASANGAN TURAP DAN TIMBUNAN JALAN RT. 05 DESA WONOSARI KECAMATAN KOTA BANGUN DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.793.400,00		28.793.400,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		28.793.400,00	0,00
	32861/LS/2023		SEMENISASI JALAN DESA RT 13 DESA KOTA BANGUN III Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.282.454,00		171.282.454,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.282.454,00	0,00
	32862/LS/2023		PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN RT 009 DESA SARINADI DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.394.900,00		38.394.900,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		38.394.900,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32863/LS/2023		Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan Kasi. Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,00		20.200.000,00
		5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		20.200.000,00	0,00
	32864/LS/2023		PENINGKATAN JALAN POROS TEMBUS KE BLOK A DESA KOTA BANGUN III Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	171.267.830,00		171.267.830,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		171.267.830,00	0,00
	32865/LS/2023		PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN KECAMATAN KOTA BANGUN RT.07 DUSUN SIDOMULYO DESA SARI NADI DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.394.900,00		38.394.900,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		38.394.900,00	0,00
	32867/LS/2023		PENGAWASAN NORMALISASI ANAK SUNGAI KANDUANG RAYA DESA KEDANG IPIL KOTA BANGUN DARAT DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.394.900,00		38.394.900,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		38.394.900,00	0,00
	32868/LS/2023		PENGAWASAN SEMENISASI JALAN RT 02 DESA SEDULANG KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.394.900,00		38.394.900,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		38.394.900,00	0,00
	32869/LS/2023		Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan Kasi. Pemerintahan Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,00		20.200.000,00
		5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		20.200.000,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32870/LS/2023		PENGAWASAN SEMENISASI JALAN RT. 04 DESA SUKA BUMI DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.796.730,00		28.796.730,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		28.796.730,00	0,00
	32871/LS/2023		PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN KECAMATAN KOTA BANGUN DESA SUKABUMI RT 03 DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37.191.660,00		37.191.660,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		37.191.660,00	0,00
	32872/LS/2023		PENGAWASAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (LEBAR JALAN 4 METER) RT.09 DAN RT.010 DESA SUMBER SARI KEC.KOTA BANGUN DARAT DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dili	28.787.850,00		28.787.850,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		28.787.850,00	0,00
	32873/LS/2023		Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan Kasi. Pelayanan Umum Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,00		20.200.000,00
		5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		20.200.000,00	0,00
	32874/LS/2023		PENGAWASAN LANJUTAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI RT 006 DESA SUKABUMI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.995.080,00		35.995.080,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		35.995.080,00	0,00
	32875/LS/2023		Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan Kasi. Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,00		20.200.000,00
		5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		20.200.000,00	0,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32876/LS/2023		PENGAWASAN LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT.15 DESA. KOTA BANGUN 2 KEC. KOTA BANGUN DARAT DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	58.608.000,00		58.608.000,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		58.608.000,00	0,00
	32877/LS/2023		PENGAWASAN DRAINASE JALAN LINGKUNGAN (BETON/PASANGAN BATU) JL.SARAWANA KATON RT.003 DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.394.900,00		38.394.900,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		38.394.900,00	0,00
	32878/LS/2023		Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan Camat Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,00		20.200.000,00
		5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		20.200.000,00	0,00
	32879/LS/2023		Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan Sekretaris Camat Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,00		20.200.000,00
		5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		20.200.000,00	0,00
	32880/LS/2023		Biaya BBM Mobil Pengangkut Sampah dari Bulan 1 Oktober 2023 s.d 23 Desember 2023. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan.	20.240.000,00		20.240.000,00
		5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		20.240.000,00	0,00
	32881/LS/2023		PENGAWASAN SEMENISASI JALAN NANGKA 2 RT. 02 DESA WONOSARI KECAMATAN KOTA BANGUN DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.793.400,00		28.793.400,00
		5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		28.793.400,00	0,00
Jumlah periode ini				5.937.079.476,00	5.937.079.476,00	

Jumlah sampai periode lalu	20.079.296.721,00	20.079.296.721,00
Jumlah semua sampai periode ini	26.016.376.197,00	26.016.376.197,00

Mengetahui/Menyetujui:
PENGUNA ANGGARAN
KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT
JULKIFLI SE
NIP. 197502011998031004

Tenggarong, 02 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

AL HOFID NUR





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KARTU KREDIT PEMERINTAH
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 November 2023 s.d 30 November 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-11-2023			Saldo Awal			0,00



Tenggarong, 01 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AL HOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KARTU KREDIT PEMERINTAH
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2023			Saldo Awal			0,00

Mengetahui/Menyetujui:
PENGGUNA ANGGARAN

JULKIFLI SE
NIP 197502011998031004

Tenggarong, 02 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


AL HOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS BANK
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-10-2023			Saldo Awal			0,00

Mengetahui/Menyetujui:
PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT
JULI KIFLI, SE
NIP 197502071998031004

Tenggarong, 02 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AL HOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS BANK
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 November 2023 s.d 30 November 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-11-2023			Saldo Awal			0,00



Tenggarong, 05 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AL HOFID NUR

NIP 19720701 200701 1 023

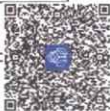




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS BANK
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2023			Saldo Awal			0,00
05-12-2023	21542/UP/2023		Uang Persediaan (UP) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023	100.000.000,00		100.000.000,00
07-12-2023	001/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal TIM KERJA KABUPATEN		5.706.000,00	94.294.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		94.864.600,00
	002/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal TIM KERJA KABUPATEN		5.706.000,00	89.158.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		89.729.200,00
	003/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal TIM KERJA KABUPATEN		5.706.000,00	84.023.200,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		84.593.800,00
	004/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal TIM KERJA KABUPATEN		5.706.000,00	78.887.800,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		79.458.400,00
	005/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal DEWAN HAKIM 1		5.706.000,00	73.752.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		74.323.000,00
	006/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal DEWAN HAKIM 2		5.706.000,00	68.617.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		69.187.600,00
	007/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH SAMBOJA PUTRA		5.706.000,00	63.481.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		64.052.200,00
	008/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal DEWAN HAKIM 4		5.706.000,00	58.346.200,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		58.916.800,00
	009/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal DEWAN HAKIM 5		5.706.000,00	53.210.800,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		53.781.400,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
14-12-2023	010/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH SAMBOJA PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00	5.706.000,00	48.075.400,00
	011/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal SEKRETARIAT 1 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00	5.706.000,00	48.646.000,00
	012/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal SEKRETARIAT 3 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00	5.706.000,00	42.940.000,00
	013/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal POS INFORMASI 1 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00	5.706.000,00	43.510.600,00
	014/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal DEWAN PENGAWAS Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00	5.706.000,00	37.804.600,00
	015/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal DEWAN HAKIM 6 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00	5.706.000,00	38.375.200,00
	016/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH ANGGANA PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00	5.706.000,00	32.669.200,00
	017/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH ANGGANA PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00	5.706.000,00	33.239.800,00
	25189/GU/2023		Ganti Uang 1 (GU 1) Kecamatan Kota Bangun Darat	97.002.000,00		33.239.800,00
	018/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH TENGGARONG SEBERANG PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00	5.706.000,00	27.533.800,00
	019/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH TENGGARONG SEBERANG PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00	5.706.000,00	28.104.400,00
						22.398.400,00
						22.969.000,00
						17.263.000,00
						17.833.600,00
						12.127.600,00
						12.698.200,00
						109.700.200,00
						103.994.200,00
						104.564.800,00
						98.858.800,00
						99.429.400,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	020/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH TENGGARONG PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	93.723.400,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			94.294.000,00
	021/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH TENGGARONG PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	88.588.000,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			89.158.600,00
	022/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MUARA MUNTAI PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	83.452.600,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			84.023.200,00
	023/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MUARA MUNTAI PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	78.317.200,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			78.887.800,00
	024/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH KEMBANG JANGGUT PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	73.181.800,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			73.752.400,00
	025/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH KEMBANG JANGGUT PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	68.046.400,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			68.617.000,00
	026/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH SAMBOJA BARAT PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	62.911.000,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			63.481.600,00
	027/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH SAMBOJA BARAT PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	57.775.600,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			58.346.200,00
	028/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH TABANG PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	52.640.200,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			53.210.800,00
	029/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH TABANG PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	47.504.800,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan,			48.075.400,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
15-12-2023	030/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MARANG KAYU PUTRI		5.706.000,00	42.369.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00		42.940.000,00
	031/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MARANG KAYU PUTRA		5.706.000,00	37.234.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00		37.804.600,00
	032/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH KOTA BANGUN PUTRI		5.706.000,00	32.098.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00		32.669.200,00
	033/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH KOTA BANGUN PUTRA		5.706.000,00	26.963.200,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00		27.533.800,00
	034/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH LOA KULU PUTRI		5.706.000,00	21.827.800,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00		22.398.400,00
	035/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.01.0063	Sewa Tanah dan/atau Bangunan BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNE T/TV BERLANGGANAN (JASA INTERNET)		1.900.000,00	20.498.400,00
	25798/GU/2023		Ganti Uang 2 (GU 2) Kecamatan Kota Bangun Darat	98.902.000,00		119.400.400,00
	036/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH LOA KULU PUTRA		5.706.000,00	113.694.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00		114.265.000,00
	037/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH LOA JANAN PUTRI		5.706.000,00	108.559.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00		109.129.600,00
	038/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH LOA JANAN PUTRA		5.706.000,00	103.423.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00		103.994.200,00
	039/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MUARA KAMAN PUTRI		5.706.000,00	98.288.200,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00		98.858.800,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	040/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MUARA KAMAN PUTRA		5.706.000,00	93.152.800,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		93.723.400,00
	041/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH KENOHAN PUTRA		5.706.000,00	88.017.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		88.588.000,00
	042/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH KENOHAN PUTRI		5.706.000,00	82.882.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		83.452.600,00
	043/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MUARA WIS PUTRA		5.706.000,00	77.746.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		78.317.200,00
	044/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MUARA WIS PUTRI		5.706.000,00	72.611.200,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		73.181.800,00
	045/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH KOTA BANGUN DARAT PUTRA		5.706.000,00	67.475.800,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		68.046.400,00
	046/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH KOTA BANGUN DARAT PUTRI		5.706.000,00	62.340.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		62.911.000,00
	047/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MUARA BADAK PUTRI		5.706.000,00	57.205.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		57.775.600,00
	048/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MUARA BADAK PUTRA		5.706.000,00	52.069.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		52.640.200,00
	049/SPI-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MUARA JAWA PUTRI		5.706.000,00	46.934.200,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		47.504.800,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
18-12-2023	050/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH MUARA JAWA PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	41.798.800,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			42.369.400,00
	051/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH SANGA-SANGA PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	36.663.400,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			37.234.000,00
	052/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH SANGA-SANGA PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)	570.600,00	5.706.000,00	31.528.000,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			32.098.600,00
	053/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH ANGGANA PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00	1.050.000,00	31.048.600,00
			Jasa			31.090.600,00
	054/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH ANGGANA PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00	1.050.000,00	30.040.600,00
			Jasa			30.082.600,00
	26348/GU/2023		Ganti Uang 3 (GU 3) Kecamatan Kota Bangun Darat	99.102.000,00		129.184.600,00
	001/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	128.614.000,00
	002/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	128.043.400,00
	003/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	127.472.800,00
	004/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	126.902.200,00
	005/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	126.331.600,00
	006/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	125.761.000,00
	007/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	125.190.400,00
	008/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	124.619.800,00
	009/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	124.049.200,00
	010/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	123.478.600,00
	011/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	122.908.000,00
	012/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	122.337.400,00
	013/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	121.766.800,00
	014/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	121.196.200,00
	015/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	120.625.600,00
	016/SPJ-GU/12/2023		Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	120.055.000,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	017/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	119.484.400,00
	055/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH SEBULU PUTRI		5.706.000,00	113.778.400,00
	056/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal KAFILAH SEBULU PUTRA	570.600,00	5.706.000,00	114.349.000,00
	057/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal SEKRETARIAT 2	570.600,00	5.706.000,00	108.643.000,00
	058/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal POS INFORMASI 2	570.600,00	5.706.000,00	109.213.600,00
	059/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal DEWAN HAKIM 3	570.600,00	5.706.000,00	104.078.200,00
	060/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.03.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal TIM VERIFIKASI	570.600,00	5.706.000,00	98.372.200,00
	061/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH SAMBOJA PUTRA	570.600,00	1.050.000,00	98.942.800,00
	062/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH SAMBOJA PUTRI	42.000,00	1.050.000,00	93.236.800,00
	063/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH TENGGARONG SEBERANG PUTRA	42.000,00	1.050.000,00	93.807.400,00
	064/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH TENGGARONG SEBERANG PUTRI	42.000,00	1.050.000,00	93.807.400,00
	065/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH TENGGARONG PUTRI	42.000,00	1.050.000,00	88.101.400,00
			Jasa			88.672.000,00
						87.622.000,00
						87.664.000,00
						86.614.000,00
						86.656.000,00
						85.606.000,00
						85.648.000,00
						84.598.000,00
						84.640.000,00
						83.590.000,00
						83.632.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	066/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH TENGGARONG PUTRA		1.050.000,00	82.582.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		82.624.000,00
			Jasa			
	067/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MUARA MUNTAI PUTRA		1.050.000,00	81.574.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		81.616.000,00
			Jasa			
	068/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MUARA MUNTAI PUTRI		1.050.000,00	80.566.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		80.608.000,00
			Jasa			
	069/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH KEMBANG JANGGUT PUTRI		1.050.000,00	79.558.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		79.600.000,00
			Jasa			
	070/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH KEMBANG JANGGUT PUTRA		1.050.000,00	78.550.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		78.592.000,00
			Jasa			
	071/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH SAMBOJA BARAT PUTRI		1.050.000,00	77.542.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		77.584.000,00
			Jasa			
	072/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH SAMBOJA BARAT PUTRA		1.050.000,00	76.534.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		76.576.000,00
			Jasa			
	073/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH TABANG PUTRA		1.050.000,00	75.526.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		75.568.000,00
			Jasa			
	074/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH TABANG PUTRI		1.050.000,00	74.518.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		74.560.000,00
			Jasa			
	075/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MARANG KAYU PUTRI		1.050.000,00	73.510.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		73.552.000,00
			Jasa			
	076/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MARANG KAYU PUTRA		1.050.000,00	72.502.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		72.544.000,00
			Jasa			
	077/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH KOTA BANGUN PUTRI		1.050.000,00	71.494.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.000,00		71.536.000,00
			Jasa			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	078/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH KOTA BANGUN PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	70.486.000,00
	079/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH LOA KULU PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	69.478.000,00
	080/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH LOA KULU PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	68.470.000,00
	081/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH LOA JANAN PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	67.462.000,00
	082/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH LOA JANAN PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	66.454.000,00
	083/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MUARA KAMAN PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	65.446.000,00
	084/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MUARA KAMAN PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	64.438.000,00
	085/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH KENOHAN PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	63.430.000,00
	086/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH KENOHAN PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	62.422.000,00
	087/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MUARA WIS PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	61.414.000,00
	088/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MUARA WIS PUTRI Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	60.406.000,00
	089/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH KOTA BANGUN DARAT PUTRA Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00	1.050.000,00	59.398.000,00
						59.440.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	090/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH KOTA BANGUN DARAT PUTRI		1.050.000,00	58.390.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		58.432.000,00
	091/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MUARA BADA PUTRI		1.050.000,00	57.382.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		57.424.000,00
	092/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MUARA BADA PUTRA		1.050.000,00	56.374.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		56.416.000,00
	093/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MUARA JAWA PUTRI		1.050.000,00	55.366.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		55.408.000,00
	094/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH MUARA JAWA PUTRA		1.050.000,00	54.358.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		54.400.000,00
	095/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH SANGA-SANGA PUTRA		1.050.000,00	53.350.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		53.392.000,00
	096/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH SANGA-SANGA PUTRI		1.050.000,00	52.342.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		52.384.000,00
	097/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH SEBULU PUTRI		1.050.000,00	51.334.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		51.376.000,00
	098/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua KAFILAH SEBULU PUTRA		1.050.000,00	50.326.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		50.368.000,00
	099/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua TIM KERJA KABUPATEN		1.050.000,00	49.318.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		49.360.000,00
	100/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua TIM KERJA KABUPATEN		1.050.000,00	48.310.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		48.352.000,00
	101/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua DEWAN HAKIM 1		1.050.000,00	47.302.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		47.344.000,00
	102/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua DEWAN HAKIM 2		1.050.000,00	46.294.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		46.336.000,00
	103/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua DEWAN HAKIM 3		1.050.000,00	45.286.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		45.328.000,00
	104/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua DEWAN HAKIM 4		1.050.000,00	44.278.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		44.320.000,00
	105/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua DEWAN HAKIM 5		1.050.000,00	43.270.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		43.312.000,00
	106/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua DEWAN PENGAWAS		1.050.000,00	42.262.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		42.304.000,00
	107/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua DEWAN HAKIM		1.050.000,00	41.254.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		41.296.000,00
	108/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua TIM VERIFIKASI		1.050.000,00	40.246.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		40.288.000,00
	109/SPJ-GU/12/2023	5.2.2.05.01.0005	BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA KEGIATAN LINMAS HANDY TALKY		12.600.000,00	27.688.000,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.248.648,00		28.936.648,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	170.270,00		29.106.918,00
	110/SPJ-GU/12/2023	5.1.2.04.01.0003	Biaya Perjalanan dinas sesuai dengan SPPD No. B.520/SPPD/KOBDAR/UMTAPE G/094/12/2023.		2.320.000,00	26.786.918,00
19-12-2023	27745/GU/2023		Ganti Uang 4 (GU 4) Kecamatan Kota Bangun Darat	99.556.000,00		126.342.918,00
20-12-2023	111 /SPJ-GU/12/2023	5.1.1.03.08.0002	Biaya Honorarium Bulanan Penanggungjawaban Pengelola Barang Bulan Oktober s.d Desember 2023 sesuai daftar terlampir.		8.400.000,00	117.942.918,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	240.000,00		118.182.918,00
	112 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.04.01.0001	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Biaya Perjalanan dinas sesuai dengan SPPD No. B.521/SPPD/KOBDAR/UMTAPE G/094/12/2023. Sub. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.460.000,00	116.722.918,00
	113 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.04.01.0001	Biaya Perjalanan dinas sesuai dengan SPPD No. B.522/SPPD/KOBDAR/UMTAPE G/094/12/2023. Sub. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		920.000,00	115.802.918,00
	114 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.01.01.0026	Biaya foto copy Sub. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		767.550,00	115.035.368,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
22-12-2023	115 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.01.01.0026	Biaya Jilid soft cover dan spiral Sub. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		740.000,00	114.295.368,00
	116 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.01.01.0024	Biaya foto copy Bulan Oktober 2023 Sub. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.584.450,00	112.710.918,00
	117 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.01.01.0024	Biaya foto copy pada Bulan Desember 2023 Sub. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.842.750,00	110.868.168,00
	118 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.01.01.0026	Biaya Jilid soft cover dan spiral sub. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		925.000,00	109.943.168,00
	119 /SPJ-GU/12/2023	5.1.1.03.07.0001	Biaya Belanja honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	303.000,00	6.060.000,00	103.883.168,00
	120 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.01.0004	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Biaya Honorarium Non PNS Anggota Keamanan dan Keteriban Kegiatan MTQ Kabupaten.		7.700.000,00	96.486.168,00
	121 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.04.01.0001	Biaya Perjalanan dinas sesuai dengan SPPD No. B.245/SPPD/KOBDAR/UMTAPE G/094/7/2023. Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		17.702.645,00	78.783.523,00
	122 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.04.01.0001	Biaya Perjalanan dinas sesuai dengan SPPD No. B.296/SPPD/KOBDAR/UMTAPE G/094/7/2023. Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		2.878.880,00	75.904.643,00
	123 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.02.01.0030	Biaya Belanja Gaji Tenaga Kebersihan Untuk Bulan Oktober s/d Desember 2023 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan.		29.700.000,00	46.204.643,00
	124 /SPJ-GU/12/2023	5.1.1.03.07.0001	Biaya Belanja honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan (PPTK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	438.000,00	8.760.000,00	37.444.643,00
	125 /SPJ-GU/12/2023	5.1.2.01.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Biaya Belanja honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan (PPKom) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	1.314.000,00	8.760.000,00	29.122.643,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun			30.436.643,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
27-12-2023	0001/STS/KOBADAR/2023		Pengembalian Atas Sisa Uang Persediaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023		1.798.725,00	28.637.918,00
29-12-2023	018/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	28.067.318,00
	019/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	27.496.718,00
	020/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	26.926.118,00
	021/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	26.355.518,00
	022/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	25.784.918,00
	023/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	25.214.318,00
	024/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	24.643.718,00
	025/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	24.073.118,00
	026/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	23.502.518,00
	027/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	22.931.918,00
	028/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	22.361.318,00
	029/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	21.790.718,00
	030/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	21.220.118,00
	031/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	20.649.518,00
	032/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	20.078.918,00
	033/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	19.508.318,00
	034/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	18.937.718,00
	036/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	18.367.118,00
	037/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	17.796.518,00
	038/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	17.225.918,00
	039/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	16.655.318,00
	040/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	16.084.718,00
	041/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	15.514.118,00
	042/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	14.943.518,00
	043/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	14.372.918,00
	044/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	13.802.318,00
	045/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	13.231.718,00
	046/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	12.661.118,00
	047/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	12.090.518,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	048/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	11.519.918,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	049/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	10.949.318,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	050/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	10.378.718,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	051/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	9.808.118,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	052/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	9.237.518,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	053/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	9.195.518,00
			Jasa			
	054/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	9.153.518,00
			Jasa			
	055/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	8.582.918,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	056/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	8.012.318,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	057/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	7.441.718,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	058/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	6.871.118,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	059/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	6.300.518,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	060/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)		570.600,00	5.729.918,00
			Sewa Tanah dan/atau Bangunan			
	061/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.687.918,00
			Jasa			
	062/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.645.918,00
			Jasa			
	063/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.603.918,00
			Jasa			
	064/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.561.918,00
			Jasa			
	065/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.519.918,00
			Jasa			
	066/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.477.918,00
			Jasa			
	067/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.435.918,00
			Jasa			
	068/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.393.918,00
			Jasa			
	069/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.351.918,00
			Jasa			
	070/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.309.918,00
			Jasa			
	071/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.267.918,00
			Jasa			
	072/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.225.918,00
			Jasa			
	073/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.183.918,00
			Jasa			
	074/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.141.918,00
			Jasa			
	075/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.099.918,00
			Jasa			
	076/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.057.918,00
			Jasa			
	077/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	5.015.918,00
			Jasa			
	078/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.000,00	4.973.918,00
			Jasa			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	079/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.931.918,00
	080/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.889.918,00
	081/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.847.918,00
	082/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.805.918,00
	083/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.763.918,00
	084/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.721.918,00
	085/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.679.918,00
	086/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.637.918,00
	087/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.595.918,00
	088/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.553.918,00
	089/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.511.918,00
	090/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.469.918,00
	091/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.427.918,00
	092/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.385.918,00
	093/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.343.918,00
	094/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.301.918,00
	095/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.259.918,00
	096/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.217.918,00
	097/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.175.918,00
	098/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.133.918,00
	099/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.091.918,00
	100/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.049.918,00
	101/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.007.918,00
	102/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.965.918,00
	103/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.923.918,00
	104/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.881.918,00
	105/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.839.918,00
	106/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.797.918,00
	107/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.755.918,00
	108/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.713.918,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	109/SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		1.248.648,00	2.465.270,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		170.270,00	2.295.000,00
	111 /SPJ-GU/12/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		240.000,00	2.055.000,00
	119 /SPJ-GU/12/2023		Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		303.000,00	1.752.000,00
	124 /SPJ-GU/12/2023		Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		438.000,00	1.314.000,00
	125 /SPJ-GU/12/2023		Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		1.314.000,00	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
PENGGUNA ANGGARAN



AL HOFID NUR
NIP 197502011998031004

Tenggarong, 02 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN



AL HOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-10-2023			Saldo Awal			0,00

Mengetahui/Menyetujui:
PENGUNA ANGGARAN
JUBRIATI, SE
NIP 19750201 1998031004

Tenggarong, 02 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN
AL HOFID MUR
NIP 19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 November 2023 s.d 30 November 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-11-2023			Saldo Awal			0,00

Mengetahui/Menyetujui:
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
JURNAL
NIP 197502011998031004

Tenggarong, 01 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN


A. HOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023





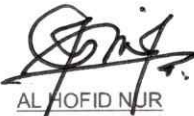
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2023			Saldo Awal			0,00

Mengetahui/Menyetujui:
PENGUNA ANGGARAN
KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT
JULKIFLI SE
NIP. 197502011988031004

Tenggarong, 02 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


AL HOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

No	Tgl Bukti	No Bukti	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1	01-10-2023		Saldo Awal			0,00
				0,00	0,00	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
PENGUNA ANGGARAN
KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT
JULKIFLI SE
NIP 197502041998031004

Tenggarong, 02 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN
AL HOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 November 2023 s.d 30 November 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

No	Tgl Bukti	No Bukti	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1	01-11-2023		Saldo Awal			0,00
				0,00	0,00	0,00



Tenggarong, 04 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AL HOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023

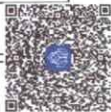




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

No	Tgl Bukti	No Bukti	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1	01-12-2023		Saldo Awal			0,00
2	07-12-2023	001/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		570.600,00
3		002/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		1.141.200,00
4		003/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		1.711.800,00
5		004/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		2.282.400,00
6		005/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		2.853.000,00
7		006/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		3.423.600,00
8		007/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		3.994.200,00
9		008/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		4.564.800,00
10		009/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		5.135.400,00
11		010/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		5.706.000,00
12		011/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		6.276.600,00
13		012/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		6.847.200,00
14		013/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		7.417.800,00
15		014/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		7.988.400,00
16		015/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		8.559.000,00
17		016/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		9.129.600,00
18		017/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		9.700.200,00
19	14-12-2023	018/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		10.270.800,00
20		019/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		10.841.400,00
21		020/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		11.412.000,00
22		021/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		11.982.600,00
23		022/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		12.553.200,00
24		023/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		13.123.800,00
25		024/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		13.694.400,00
26		025/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		14.265.000,00
27		026/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		14.835.600,00
28		027/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		15.406.200,00
29		028/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		15.976.800,00



No	Tgl Bukti	No Bukti	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
30	15-12-2023	029/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		16.547.400,00
31		030/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		17.118.000,00
32		031/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		17.688.600,00
33		032/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		18.259.200,00
34		033/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		18.829.800,00
35		034/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		19.400.400,00
36		036/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		19.971.000,00
37		037/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		20.541.600,00
38		038/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		21.112.200,00
39		039/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		21.682.800,00
40		040/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		22.253.400,00
41		041/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		22.824.000,00
42		042/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		23.394.600,00
43		043/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		23.965.200,00
44		044/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		24.535.800,00
45		045/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		25.106.400,00
46		046/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		25.677.000,00
47		047/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		26.247.600,00
48		048/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		26.818.200,00
49		049/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		27.388.800,00
50		050/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		27.959.400,00
51		051/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		28.530.000,00
52		052/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		29.100.600,00
53		053/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		29.142.600,00
54		054/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		29.184.600,00
55		109/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.248.648,00		30.433.248,00
56		055/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		31.003.848,00
57		056/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		31.574.448,00
58		057/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		32.145.048,00
59		058/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		32.715.648,00
60		059/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		33.286.248,00
61		060/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	570.600,00		33.856.848,00
62		109/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	170.270,00		34.027.118,00



No	Tgl Bukti	No Bukti	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
63		061/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.069.118,00
64		062/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.111.118,00
65		063/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.153.118,00
66		064/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.195.118,00
67		065/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.237.118,00
68		066/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.279.118,00
69		067/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.321.118,00
70		068/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.363.118,00
71		069/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.405.118,00
72		070/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.447.118,00
73		071/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.489.118,00
74		072/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.531.118,00
75		073/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.573.118,00
76		074/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.615.118,00
77		075/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.657.118,00
78		076/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.699.118,00
79		077/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.741.118,00
80		078/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.783.118,00
81		079/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.825.118,00
82		080/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.867.118,00
83		081/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.909.118,00
84		082/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.951.118,00
85		083/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		34.993.118,00
86		084/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.035.118,00
87		085/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.077.118,00
88		086/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.119.118,00
89		087/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.161.118,00
90		088/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.203.118,00
91		089/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.245.118,00
92		090/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.287.118,00
93		091/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.329.118,00
94		092/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.371.118,00
95		093/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.413.118,00
96		094/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.455.118,00
97		095/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.497.118,00
98		096/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.539.118,00
99		097/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.581.118,00
100		098/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.623.118,00
101		099/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.665.118,00
102		100/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.707.118,00
103		101/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.749.118,00
104		102/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.791.118,00
105		103/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.833.118,00
106		104/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.875.118,00
107		105/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.917.118,00
108		106/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		35.959.118,00
109		107/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		36.001.118,00
110		108/SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		36.043.118,00
111		001/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	35.472.518,00
112		002/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	34.901.918,00
113		003/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	34.331.318,00
114		004/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	33.760.718,00
115		005/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	33.190.118,00
116		006/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	32.619.518,00
117		007/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	32.048.918,00
118		008/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	31.478.318,00



No	Tgl Bukti	No Bukti	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
119		009/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	30.907.718,00
120		010/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	30.337.118,00
121		011/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	29.766.518,00
122		012/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	29.195.918,00
123		013/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	28.625.318,00
124		014/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	28.054.718,00
125		015/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	27.484.118,00
126		016/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	26.913.518,00
127		017/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	26.342.918,00
128	20-12-2023	119 /SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	303.000,00		26.645.918,00
129		111 /SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	240.000,00		26.885.918,00
130	22-12-2023	125 /SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	1.314.000,00		28.199.918,00
131		124 /SPJ-GU/12/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	438.000,00		28.637.918,00
132	29-12-2023	018/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	28.067.318,00
133		019/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	27.496.718,00
134		020/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	26.926.118,00
135		021/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	26.355.518,00
136		022/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	25.784.918,00
137		023/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	25.214.318,00
138		024/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	24.643.718,00
139		025/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	24.073.118,00
140		026/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	23.502.518,00
141		027/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	22.931.918,00
142		028/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	22.361.318,00
143		029/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	21.790.718,00
144		030/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	21.220.118,00
145		031/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	20.649.518,00
146		032/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	20.078.918,00
147		033/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	19.508.318,00
148		034/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	18.937.718,00
149		036/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	18.367.118,00
150		037/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	17.796.518,00



No	Tgl Bukti	No Bukti	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
151		038/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	17.225.918,00
152		039/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	16.655.318,00
153		040/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	16.084.718,00
154		041/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	15.514.118,00
155		042/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	14.943.518,00
156		043/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	14.372.918,00
157		044/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	13.802.318,00
158		045/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	13.231.718,00
159		046/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	12.661.118,00
160		047/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	12.090.518,00
161		048/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	11.519.918,00
162		049/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	10.949.318,00
163		050/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	10.378.718,00
164		051/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	9.808.118,00
165		052/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	9.237.518,00
166		053/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	9.195.518,00
167		054/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	9.153.518,00
168		055/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	8.582.918,00
169		056/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	8.012.318,00
170		057/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	7.441.718,00
171		058/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	6.871.118,00
172		059/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	6.300.518,00
173		060/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		570.600,00	5.729.918,00
174		061/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.687.918,00
175		062/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.645.918,00
176		063/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.603.918,00
177		064/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.561.918,00
178		065/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.519.918,00
179		066/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.477.918,00
180		067/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.435.918,00
181		068/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.393.918,00
182		069/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.351.918,00
183		070/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.309.918,00
184		071/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.267.918,00
185		072/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.225.918,00
186		073/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.183.918,00
187		074/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.141.918,00
188		075/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.099.918,00
189		076/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.057.918,00
190		077/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	5.015.918,00
191		078/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.973.918,00



No	Tgl Bukti	No Bukti	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
192		079/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.931.918,00
193		080/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.889.918,00
194		081/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.847.918,00
195		082/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.805.918,00
196		083/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.763.918,00
197		084/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.721.918,00
198		085/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.679.918,00
199		086/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.637.918,00
200		087/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.595.918,00
201		088/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.553.918,00
202		089/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.511.918,00
203		090/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.469.918,00
204		091/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.427.918,00
205		092/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.385.918,00
206		093/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.343.918,00
207		094/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.301.918,00
208		095/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.259.918,00
209		096/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.217.918,00
210		097/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.175.918,00
211		098/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.133.918,00
212		099/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.091.918,00
213		100/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.049.918,00
214		101/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	4.007.918,00
215		102/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.965.918,00
216		103/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.923.918,00
217		104/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.881.918,00
218		105/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.839.918,00
219		106/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.797.918,00
220		107/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.755.918,00
221		108/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	3.713.918,00
222		109/SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		1.248.648,00	2.465.270,00
223			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		170.270,00	2.295.000,00
224		111 /SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		240.000,00	2.055.000,00
225		119 /SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		303.000,00	1.752.000,00
226		124 /SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		438.000,00	1.314.000,00
227		125 /SPJ-GU/12/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		1.314.000,00	0,00
				38.338.118,00	38.338.118,00	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
PENGGUNA ANGGARAN

JULKIFLI SE
NIP. 197502011998031004

Tenggarong, 02 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

AL HOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - ADMINISTRATIF

Urusan Pemerintahan : 7-01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
PENGUNA ANGARAN : JULKIFLI, SE
Bendahara Pengeluaran : AL HOFID NUR
Bulan : November

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU			BULAN INI			s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji								
			SPJ - LS Barang & Jasa								
			SPJ - UP/GU/TU								
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.540.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.530.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.552.200,00	9.978.676,00	
			0,00	0,00	28.552.200,00	28.552.200,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji				SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI			
			SPJ - LS Barang & Jasa					
			SPJ - UP/GU/TU					
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71.213.000,00	0,00	0,00	0,00	40.420.000,00	30.793.000,00	
			0,00	40.420.000,00	40.420.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	157.580.000,00	0,00	0,00	0,00	150.115.000,00	7.465.000,00	
			0,00	150.115.000,00	150.115.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.020.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	26.720.000,00	
			0,00	22.300.000,00	22.300.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.714.000,00	0,00	0,00	0,00	49.332.000,00	27.382.000,00	
			0,00	49.332.000,00	49.332.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.450.000,00	0,00	0,00	0,00	53.312.500,00	6.137.500,00	
			0,00	53.312.500,00	53.312.500,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.288.233.124,00	0,00	0,00	0,00	2.683.926.836,00	15.604.306.288,00	
			0,00	2.683.926.836,00	2.683.926.836,00			
			0,00	0,00	0,00			



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	133.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.707.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	727.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.803.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	88.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.076.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	112.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.610.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	42.800.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	800.000,00
			0,00	42.000.000,00	42.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.856.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	51.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	725.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.360.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	577.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	648.500.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000.000,00	
			0,00	645.000.000,00	645.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	325.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.650.000,00	
			0,00	174.650.000,00	174.650.000,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	464.499.000,00	0,00	0,00	0,00	392.700.000,00	71.799.000,00
			0,00	392.700.000,00	392.700.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	105.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.624.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	227.000.000,00	0,00	0,00	0,00	225.200.000,00	1.800.000,00
			0,00	225.200.000,00	225.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	52.060.000,00	0,00	0,00	0,00	46.360.000,00	5.700.000,00
			0,00	46.360.000,00	46.360.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.680.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	12.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ s.d BULAN INI			SISA ANGGARAN	
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	322.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.616.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.592.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	750.680.000,00	0,00	0,00	0,00	553.300.000,00	197.380.000,00
			0,00	553.300.000,00	553.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	263.520.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000.000,00	110.520.000,00
			0,00	153.000.000,00	153.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	468.000.000,00	0,00	0,00	0,00	362.310.940,00	105.689.060,00
			0,00	362.310.940,00	362.310.940,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	545.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.040.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU			BULAN INI		SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji			SPJ - UP/GUTU			
			SPJ - LS Barang & Jasa						
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	307.770.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000.000,00	16.770.000,00		
			0,00	291.000.000,00	291.000.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	100.000,00		
			0,00	23.600.000,00	23.600.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
	Total	27.975.450.000,00	0,00	0,00	0,00	5.937.079.476,00	22.038.370.524,00		
			0,00	5.937.079.476,00	5.937.079.476,00				
			0,00	0,00	0,00				



/

Penerimaan	
- SP2D	5.937.079,476,00
- Lain-Lain	0,00
Jumlah Penerimaan	5.937.079,476,00
Pengeluaran	
- SPJ (LS + UP/GU/TU)	5.937.079,476,00
- Lain-Lain	0,00
Jumlah Pengeluaran	5.937.079,476,00
Saldo Kas	0,00

Tenggatong, 5 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN


AL HOFID NUR
NIP19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - ADMINISTRATIF

Urusan Pemerintahan : 7-01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
PENGUNA ANGARAN : JULKIFLI, SE
Bendahara Pengeluaran : AL HOFID NUR
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU			BULAN INI		s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa	SPJ - UP/GU/TU			
			SPJ - LS Barang & Jasa							
			SPJ - UP/GU/TU							
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.540.000,00	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	51.120.000,00	2.420.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	14.820.000,00	14.820.000,00	0,00				
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.760.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.720.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00				
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240.000,00	8.760.000,00	
			0,00	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.530.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.099.276,00	1.431.600,00	
			28.552.200,00	5.119.876,00	33.672.076,00	0,00				
			0,00	3.427.200,00	3.427.200,00	0,00				



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
SPJ - LS Barang & Jasa							
SPJ - UP/GU/TU							
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71.213.000,00	0,00	0,00	0,00	63.205.000,00	8.008.000,00
			40.420.000,00	22.785.000,00	63.205.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	157.580.000,00	0,00	0,00	0,00	152.547.550,00	5.032.450,00
			150.115.000,00	0,00	150.115.000,00		
			0,00	2.432.550,00	2.432.550,00		
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.020.000,00	0,00	0,00	0,00	48.414.864,00	605.136,00
			22.300.000,00	26.114.864,00	48.414.864,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.714.000,00	0,00	0,00	0,00	76.046.000,00	668.000,00
			49.332.000,00	26.714.000,00	76.046.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.450.000,00	0,00	0,00	0,00	53.312.500,00	6.137.500,00
			53.312.500,00	0,00	53.312.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.288.233.124,00	0,00	0,00	0,00	17.907.709.417,00	380.523.707,00
			2.683.926.836,00	15.215.022.581,00	17.898.949.417,00		
			0,00	8.760.000,00	8.760.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU			BULAN INI		s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN	
			SPJ - LS Gaji								
			SPJ - LS Barang & Jasa								
			SPJ - UP/GU/TU								
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	133.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.025.600,00	28.681.400,00		
			0,00	105.025.600,00	0,00	105.025.600,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	727.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.628.700,00	14.174.300,00		
			0,00	713.628.700,00	0,00	713.628.700,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	88.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.306.100,00	1.769.900,00		
			0,00	86.306.100,00	0,00	86.306.100,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaiian Dinas Lapangan (PDL)	112.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.150.000,00	460.000,00		
			0,00	112.150.000,00	0,00	112.150.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaiian Adat Daerah	42.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	800.000,00		
			42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaiian Batik Tradisional	32.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.856.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	51.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800.000,00	9.400.000,00		
			0,00	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	725.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.840.000,00	24.520.000,00		
			0,00	693.140.000,00	0,00	693.140.000,00	0,00				
			0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00				



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji				SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	SPJ - LS Barang & Jasa			
					SPJ - UP/GU/TU			
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohanriwan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	12.300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	29.700.000,00	29.700.000,00			
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juni Perlombaan/Pertandingan	577.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000.000,00	0,00
			0,00	577.000.000,00	577.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
			0,00	17.500.000,00	17.500.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	648.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000.000,00	3.500.000,00
			645.000.000,00	0,00	645.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	845.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	1.900.000,00	1.900.000,00			
5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	325.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.242.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	325.242.000,00	325.242.000,00			
5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.650.000,00	350.000,00
			174.650.000,00	0,00	174.650.000,00			
			0,00	0,00	0,00			



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	464.499.000,00	0,00	0,00	0,00	417.900.000,00	46.599.000,00
			392.700.000,00	25.200.000,00	417.900.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	105.624.000,00	0,00	0,00	0,00	59.340.000,00	46.284.000,00
			0,00	59.340.000,00	59.340.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	52.500.000,00	52.500.000,00		
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	227.000.000,00	0,00	0,00	0,00	225.200.000,00	1.800.000,00
			225.200.000,00	0,00	225.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	52.060.000,00	0,00	0,00	0,00	46.360.000,00	5.700.000,00
			46.360.000,00	0,00	46.360.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	141.400.000,00	8.600.000,00
			0,00	141.400.000,00	141.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.680.000,00	0,00	0,00	0,00	22.961.525,00	45.718.475,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	22.961.525,00	22.961.525,00		
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	12.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji						SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa							
			SPJ - UP/GU/TTU							
			s.d BULAN LALU		BULAN INI		s.d BULAN INI			
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	322.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.790.000,00	270.826.000,00	
			0,00	49.470.000,00	49.470.000,00					
			0,00	2.320.000,00	2.320.000,00					
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.592.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000.000,00	72.000.000,00	
			0,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00					
			0,00	0,00	0,00					
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Perumpang	750.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.300.000,00	197.380.000,00	
			553.300.000,00	0,00	553.300.000,00					
			0,00	0,00	0,00					
5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	263.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000.000,00	110.520.000,00	
			153.000.000,00	0,00	153.000.000,00					
			0,00	0,00	0,00					
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	468.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.310.940,00	105.689.060,00	
			362.310.940,00	0,00	362.310.940,00					
			0,00	0,00	0,00					
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	545.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000.000,00	49.040.000,00	
			0,00	496.000.000,00	496.000.000,00					
			0,00	0,00	0,00					
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	582.000,00	
			0,00	0,00	0,00					
			0,00	12.600.000,00	12.600.000,00					
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUTU			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	.. 307.770.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000.000,00	16.770.000,00
			291.000.000,00	0,00	291.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	100.000,00
			23.600.000,00	0,00	23.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
	Total	27.975.450.000,00	0,00	38.340.000,00	38.340.000,00	26.437.139.472,00	1.538.310.528,00
			5.937.079.476,00	19.968.956.721,00	25.906.036.197,00		
			0,00	492.763.275,00	492.763.275,00		

Penerimaan

- SP2D	26.510.938.197,00
- Pajak Penghasilan Ps. 21	2.295.000,00
- Pajak Penghasilan Ps. 22	170.270,00
- Pajak Penghasilan Ps. 23	2.100.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai	1.248.648,00
- Lain-Lain	32.524.200,00
Jumlah Penerimaan	26.549.276.315,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU)	26.509.139.472,00
- Pajak Penghasilan Ps. 21	2.295.000,00
- Pajak Penghasilan Ps. 22	170.270,00
- Pajak Penghasilan Ps. 23	2.100.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai	1.248.648,00
- Lain-Lain	34.322.925,00
Jumlah Pengeluaran	26.549.276.315,00

Saldo Kas	0,00
-----------	------

T enggarong, 2 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


Al/HOFID NUR
NIP19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535

Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Oktober 2023

Nama Penutup Kas : AL HOFID NUR

Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31 Oktober 2023

Jumlah transaksi s/d bulan

- Jumlah Total Penerimaan

Rp -

- Jumlah Total Pengeluaran

Rp -

Saldo Buku

Rp -

Saldo Kas

Rp -

Terdiri atas :

1. Uang Kertas :

Pecahan Rp 100.000 = 0 lembar

Rp -

Pecahan Rp 50.000 = 0 lembar

Rp -

Pecahan Rp 20.000 = 0 lembar

Rp -

Pecahan Rp 10.000 = 0 lembar

Rp -

Pecahan Rp 5.000 = 0 lembar

Rp -

Pecahan Rp 2.000 = 0 lembar

Rp -

Pecahan Rp 1.000 = 0 lembar

Rp -

Rp -

2. Uang Logam :

Pecahan Rp 2.000 = 0 keping

Rp -

Pecahan Rp 1.000 = 0 keping

Rp -

Pecahan Rp 500 = 0 keping

Rp -

Pecahan Rp 200 = 0 keping

Rp -

Pecahan Rp 100 = 0 keping

Rp -

Pecahan Rp 50 = 0 keping

Rp -

Pecahan Rp 25 = 0 keping

Rp -

Rp -

3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi/SP2D wesel, cek, saldo bank, materai dan sebagainya.....

Saldo Bank

Rp -

saldo rek koran Rp -

saldo rek titipan pajak Rp -

saldo rek BPP Rp -

Panjar PPTK Rp -

Jumlah

Rp -

Perbedaan Positif/negatif Rp -

4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif -



Kota Bangun Darat, 31 Oktober 2023

Bendahara Pengeluaran

ALHOFID NUR

NIP. 197207012007011023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	: 30 Nopember 2023			
Nama Penutup Kas	: AL HOFID NUR			
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	: 31 Oktober 2023			
Jumlah transaksi s/d bulan	: 30 Nopember 2023			
- Jumlah Total Penerimaan			Rp	5.937.079.476,00
- Jumlah Total Pengeluaran			Rp	5.937.079.476,00
		Saldo Buku	Rp	-
		Saldo Kas	Rp	-
Terdiri atas :				
1.	Uang Kertas :			
	Pecahan	Rp 100.000 = 0 lembar	Rp	-
	Pecahan	Rp 50.000 = 0 lembar	Rp	-
	Pecahan	Rp 20.000 = 0 lembar	Rp	-
	Pecahan	Rp 10.000 = 0 lembar	Rp	-
	Pecahan	Rp 5.000 = 0 lembar	Rp	-
	Pecahan	Rp 2.000 = 0 lembar	Rp	-
	Pecahan	Rp 1.000 = 0 lembar	Rp	-
			Rp	-
			Rp	-
2.	Uang Logam :			
	Pecahan	Rp 2.000 = 0 keping	Rp	-
	Pecahan	Rp 1.000 = 0 keping	Rp	-
	Pecahan	Rp 500 = 0 keping	Rp	-
	Pecahan	Rp 200 = 0 keping	Rp	-
	Pecahan	Rp 100 = 0 keping	Rp	-
	Pecahan	Rp 50 = 0 keping	Rp	-
	Pecahan	Rp 25 = 0 keping	Rp	-
			Rp	-
			Rp	-
3.	Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi/SP2D wesel, cek,saldo bank, materai dan sebagainya.....			
		Saldo Bank	Rp	-
	saldo rek koran	Rp	-	
	saldo rek titipan pajak	Rp	-	
	saldo rek BPP	Rp	-	
	Panjar PPTK	Rp	-	
		Jumlah	Rp	-
		Perbedaan Positif/negatif	Rp	-
4.	Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif -			



Kota Bangun Darat, 30 Nopember 2023
Bendahara Pengeluaran

AL HOFID NUR

NIP. 197207012007011023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	: 31 Desember 2023		
Nama Penutup Kas	: ALHOFID NUR		
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	: 30 November 2023		
Jumlah transaksi s/d bulan	: Desember 2023		
- Jumlah Total Penerimaan		Rp	20.612.196.839,00
- Jumlah Total Pengeluaran		Rp	20.612.196.839,00
	Saldo Buku	Rp	-
	Saldo Kas	Rp	-
Terdiri atas :			
1. Uang Kertas :			
Pecahan	Rp 100.000 =	0 lembar	Rp -
Pecahan	Rp 50.000 =	0 lembar	Rp -
Pecahan	Rp 20.000 =	0 lembar	Rp -
Pecahan	Rp 10.000 =	0 lembar	Rp -
Pecahan	Rp 5.000 =	0 lembar	Rp -
Pecahan	Rp 2.000 =	0 lembar	Rp -
Pecahan	Rp 1.000 =	0 lembar	Rp -
			Rp -
2. Uang Logam :			
Pecahan	Rp 2.000 =	0 keping	Rp -
Pecahan	Rp 1.000 =	0 keping	Rp -
Pecahan	Rp 500 =	0 keping	Rp -
Pecahan	Rp 200 =	0 keping	Rp -
Pecahan	Rp 100 =	0 keping	Rp -
Pecahan	Rp 50 =	0 keping	Rp -
Pecahan	Rp 25 =	0 keping	Rp -
			Rp -
3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi/SP2D wesel, cek, saldo bank, materai dan sebagainya.....		Saldo Bank	Rp -
saldo rek koran	Rp	-	-
saldo rek titipan pajak	Rp	-	-
saldo rek BPP	Rp	-	-
Panjar PPTK	Rp	-	-
	Jumlah	Rp	-
	Perbedaan Positif/negatif	Rp	-
4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif	-		



Kota Bangun, 31 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

ALHOFID NUR
NIP. 197207012007011023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REGISTER SURAT TANDA SETOR (STS)

Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

No	Tanggal	No STS	Kode Jenis Setoran		Uraian	Nilai STS (Rp)	Keterangan
1	27/12/2023	0001/STS/KOBADAR/2023	PUP1	UP	Pengembalian atas Atas Sisa Uang Persediaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023.	1.798.725,00	
2	29/12/2023	0002/STS/KOBADAR/2023	BLB1	LS	Pengembalian Atas Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2023	72.000.000,00	
Jumlah						73.798.725,00	

Kota Bangun Darat, 11 Januari 2024

Pengguna Anggaran,



JULKIFLI, SE

NIP. 19750201 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

SURAT TANDA SETORAN
(STS)

Wajib Setor/Wajib
Bayar/Bendahara
Sebagai Bukti Setoran

1. Nomor STS : 0001/STS/KOBADAR/2023
2. Bank Penerima : Bank Kaltimara Cabang Kota Bangun III
3. Nama / Nomor Rekening Bank : Rek.Penerimaan Daerah Kukar Nomor: 0041300019
4. Penyetor : AL HOFID NUR
5. NO. SKPD/KODE SETORAN/TAHUN :

KODE SKPD: 4.11.16.01KODE JENIS SETORAN PUP1TAHUN KEGIATAN: 2023
6. Harap Menerima Uang Sebesar : Rp 1.798.725,00
(dengan huruf) : /// Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah///
7. Program : -
8. Kegiatan : -
9. Keterangan : Pengembalian Atas Sisa Uang Persediaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023

NO	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA	JUMLAH
1.			Rp 1.798.725,00
JUMLAH			Rp 1.798.725,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

JULKIFLI, SE

NIP. 19750201 199803 1 004

Penyetor

AL HOFID NUR

NIP. 19720701 200701 1 023

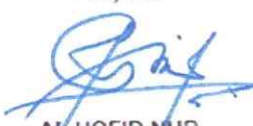
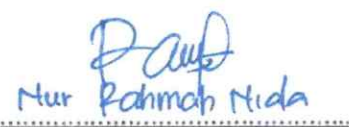
Kota Bangun Darat, 27 Desember 2023

Yang Menerima

Bank Kaltimara

ZULKIFLI HM

004 KTM004KRTT 011004K046 00000 157
19720701 200701 1 023
19750201 199803 1 004
19720701 200701 1 023

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	SURAT TANDA SETORAN (STS)	Wajib Setor/Wajib Bayar/Bendahara Sebagai Bukti Setoran																								
1. Nomor STS0002/STS/KOBADAR/2023 2. Bank PenerimaBank Kaltimara Cabang Kota Bangun III 3. Nama / Nomor Rekening BankRek. Penerimaan Daerah Kukar Nomor 00413000019 4. PenyetorAL HOFID NUR 5. NO SKPD/KODE SETORAN/TAHUN KODE SKPD 4.11.16.01 KODE JENIS SETORAN BLB1 TAHUN KEGIATAN 2023 6. Harap Menerima Uang Sebesar (dengan huruf)Rp 72.000.000,00 /// Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah /// 7. Program7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8. Kegiatan7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9. KeteranganPengembalian Atas Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2023																										
10.<table><thead><tr><th>NO</th><th>KODE PROG./KEG./REK.</th><th>URAIAN BELANJA</th><th>JUMLAH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5.1.02.05.01.0001</td><td>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</td><td>Rp 72.000.000,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td>Rp 72.000.000,00</td></tr></tbody></table>			NO	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA	JUMLAH	1	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp 72.000.000,00													JUMLAH			Rp 72.000.000,00
NO	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA	JUMLAH																							
1	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp 72.000.000,00																							
JUMLAH			Rp 72.000.000,00																							
Mengetahui, Pengguna Anggaran  JUL KIFLI, SE NIP. 19750201 199803 1 004	Penyetor  AL HOFID NUR NIP. 19720701 200701 1 023	Kota Bangun Darat, 29 Desember 2023 Yang Menerima  Mur Rahmah Nida																								



[illegible]

PLAFON	0.00
PAKI DEBIT	0.00
LONG. TARIK	0.00

24.

NADILLA PUTRI RAHMADANI



Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.

KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
JL PEMBANGUNAN RT 002
KUTAI KARTANEGARA

No. Rekening : 0041429097
Valuta : IDR
Periode : 01-11-2023 s/d 30-11-2023
Cabang : Cabangenggarong
NPWP : 507472454728000

Tidak ada data mutasi.

1. Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setuju
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
3. Bilamana terdapat perbedaan antara cetakan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah pembukuan Bank.
4. Bank setiap saat berhak melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan pada Rekening Koran.

Samarinda, 29 Desember 2023

NADILLA PUTRI RAHMADANI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - FUNGSIONAL

Urusan Pemerintahan : 7-01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
PENGUNA ANGARAN : JULKIFLI, SE
Bendahara Pengeluaran : AL HOFID NUR
Bulan : Oktober

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GUTU				
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.540.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.530.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.530.876,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GUTU				
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.213.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	157.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.580.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.020.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Parabot Kantor	76.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.714.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.450.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.288.233.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.288.233.124,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GUTU				
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	133.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.707.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	727.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.803.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	88.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.076.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakelan Dinas Lapangan (PDL)	112.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.610.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakelan Adat Daerah	42.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakelan Batik Tradisional	32.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.856.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	51.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	725.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.360.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GUTU				
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohanliwan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	577.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	648.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	325.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.242.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GUTU				
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	464.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.499.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	105.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.624.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	227.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	52.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.060.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.680.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	12.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji						SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN	
			SPJ - LS Barang & Jasa								
			SPJ - UP/GU/TU								
			s.d BULAN LALU	BULAN INI		s.d BULAN INI					
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	322.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.616.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Pertimbangan	1.592.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	750.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.680.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	263.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.520.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	468.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	545.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.040.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			BULAN INI				
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/G/UTU				
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	307.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.770.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
	Total	27.975.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.975.450.000,00
			0,00	0,00	0,00		

Penerimaan	
- Lain-Lain	0,00
Jumlah Penerimaan	0,00
Pengeluaran	
- Lain-Lain	0,00
Jumlah Pengeluaran	0,00
Saldo Kas	0,00

T enggarong, 2 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN


AL HOFID MUR
 NIP19720701 200701 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERTANGGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - FUNGSIONAL

Urusan Pemerintahan	: 7-01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7-01.0-00.0-00.19.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit Organisasi	: 7-01.0-00.0-00.19.0.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
PENGUNA ANGGARAN	: JULKIFLI, SE
Bendahara Pengeluaran	: AL HOFID NUR
Bulan	: November

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	53.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.540.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.530.876,00	0,00	0,00	0,00	28.552.200,00	9.978.676,00
			0,00	28.552.200,00	28.552.200,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU				SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI			
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71.213.000,00	0,00	0,00	0,00	40.420.000,00	30.793.000,00	
			0,00	40.420.000,00	40.420.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	157.580.000,00	0,00	0,00	0,00	150.115.000,00	7.465.000,00	
			0,00	150.115.000,00	150.115.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.020.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	26.720.000,00	
			0,00	22.300.000,00	22.300.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Parabot Kantor	76.714.000,00	0,00	0,00	0,00	49.332.000,00	27.382.000,00	
			0,00	49.332.000,00	49.332.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.450.000,00	0,00	0,00	0,00	53.312.500,00	6.137.500,00	
			0,00	53.312.500,00	53.312.500,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.288.233.124,00	0,00	0,00	0,00	2.683.926.836,00	15.604.306.288,00	
			0,00	2.683.926.836,00	2.683.926.836,00			
			0,00	0,00	0,00			



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ s.d BULAN INI			SISA ANGGARAN	
			s.d BULAN LALU	BULAN INI			
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	133.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.707.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	727.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.803.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	88.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.076.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaiian Dinas Lapangan (PDL)	112.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.610.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaiian Adat Daerah	42.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
			0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaiian Batik Tradisional	32.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.856.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	51.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	725.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	577.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	648.500.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000.000,00	3.500.000,00
			0,00	645.000.000,00	645.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	325.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.242.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.650.000,00	350.000,00
			0,00	174.650.000,00	174.650.000,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ s.d BULAN INI			SISA ANGGARAN	
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GUTU				
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	464.499.000,00	0,00	0,00	0,00	392.700.000,00	71.799.000,00
			0,00	392.700.000,00	392.700.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	105.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.624.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	227.000.000,00	0,00	0,00	0,00	225.200.000,00	1.800.000,00
			0,00	225.200.000,00	225.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	52.060.000,00	0,00	0,00	0,00	46.360.000,00	5.700.000,00
			0,00	46.360.000,00	46.360.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.680.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	12.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU			BULAN INI		SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji						
			SPJ - LS Barang & Jasa						
			SPJ - UP/GUTU						
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	322.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.616.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.592.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	750.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.300.000,00	197.380.000,00
			0,00	553.300.000,00	553.300.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	263.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000.000,00	110.520.000,00
			0,00	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	468.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.310.940,00	105.689.060,00
			0,00	362.310.940,00	362.310.940,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	545.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.040.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU			BULAN INI		SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji			SPJ - UP/GU/TTU			
			SPJ - LS Barang & Jasa						
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	307.770.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000.000,00	0,00	291.000.000,00	16.770.000,00
			0,00	291.000.000,00	291.000.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	100.000,00
			0,00	23.600.000,00	23.600.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
	Total	27.975.450.000,00	0,00	0,00	0,00	5.937.079.476,00	0,00	5.937.079.476,00	22.038.370.524,00
			0,00	5.937.079.476,00	5.937.079.476,00				
			0,00	0,00	0,00				

Penerimaan	
- SP2D	5.937.079,476,00
- Lain-Lain	0,00
Jumlah Penerimaan	5.937.079,476,00
Pengeluaran	
- SPJ (LS + UP/GU/TU)	5.937.079,476,00
- Lain-Lain	0,00
Jumlah Pengeluaran	5.937.079,476,00
Saldo Kas	0,00

Tenggarong, 5 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN


AL HOFID NUR
 NIP19720701 200701 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERTANGGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - FUNGSIONAL

Urusan Pemerintahan : 7-01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
PENGGUNA ANGGARAN : JULKIFLI, SE
Bendahara Pengeluaran : AL HOFID NUR
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ s.d BULAN INI			SISA ANGGARAN	
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	53.540.000,00	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	51.120.000,00	2.420.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	14.820.000,00	14.820.000,00		
			0,00	2.040.000,00	2.040.000,00		
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.720.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	8.400.000,00	8.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.240.000,00	8.760.000,00
			0,00	20.240.000,00	20.240.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.530.876,00	0,00	0,00	0,00	37.099.276,00	1.431.600,00
			28.552.200,00	5.119.876,00	33.672.076,00		
			0,00	3.427.200,00	3.427.200,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI			SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa						
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI				
			SPJ - UP/GUTU						
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71.213.000,00	0,00	0,00	0,00	40.420.000,00	22.785.000,00	63.205.000,00	8.008.000,00
			0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	157.580.000,00	0,00	0,00	0,00	150.115.000,00	0,00	150.115.000,00	5.032.450,00
			0,00	0,00	2.432.550,00	0,00	2.432.550,00		
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.020.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	26.114.864,00	48.414.864,00	605.136,00
			0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.714.000,00	0,00	0,00	0,00	49.332.000,00	26.714.000,00	76.046.000,00	668.000,00
			0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
			0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.450.000,00	0,00	0,00	0,00	53.312.500,00	0,00	53.312.500,00	6.137.500,00
			0,00	0,00	0,00				
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.288.233.124,00	0,00	0,00	0,00	2.683.926.836,00	15.215.022.581,00	17.898.949.417,00	380.523.707,00
			0,00	0,00	8.760.000,00		8.760.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	133.707.000,00	0,00	0,00	0,00	105.025.600,00	28.681.400,00
			0,00	105.025.600,00	105.025.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	727.803.000,00	0,00	0,00	0,00	713.628.700,00	14.174.300,00
			0,00	713.628.700,00	713.628.700,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	88.076.000,00	0,00	0,00	0,00	86.306.100,00	1.769.900,00
			0,00	86.306.100,00	86.306.100,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	112.610.000,00	0,00	0,00	0,00	112.150.000,00	460.000,00
			0,00	112.150.000,00	112.150.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	42.800.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	800.000,00
			42.000.000,00	0,00	42.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.856.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	51.200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800.000,00	9.400.000,00
			0,00	41.800.000,00	41.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	725.360.000,00	0,00	0,00	0,00	700.840.000,00	24.520.000,00
			0,00	693.140.000,00	693.140.000,00		
			0,00	7.700.000,00	7.700.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	12.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	577.000.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000.000,00	0,00
			0,00	577.000.000,00	577.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
			0,00	17.500.000,00	17.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	648.500.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000.000,00	3.500.000,00
			645.000.000,00	0,00	645.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Belanggaran	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	845.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.900.000,00	1.900.000,00		
5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	325.242.000,00	0,00	0,00	0,00	325.242.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	325.242.000,00	325.242.000,00		
5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.650.000,00	350.000,00
			174.650.000,00	0,00	174.650.000,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI		
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UPI/GUTU				
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	464.499.000,00	0,00	0,00	0,00	417.900.000,00	46.599.000,00
			392.700.000,00	25.200.000,00	417.900.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	105.624.000,00	0,00	0,00	0,00	59.340.000,00	46.284.000,00
			0,00	59.340.000,00	59.340.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	52.500.000,00	52.500.000,00		
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	227.000.000,00	0,00	0,00	0,00	225.200.000,00	1.800.000,00
			225.200.000,00	0,00	225.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	52.060.000,00	0,00	0,00	0,00	46.360.000,00	5.700.000,00
			46.360.000,00	0,00	46.360.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	141.400.000,00	8.600.000,00
			0,00	141.400.000,00	141.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.680.000,00	0,00	0,00	0,00	22.961.525,00	45.718.475,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	22.961.525,00	22.961.525,00		
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	12.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Gaji				SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa					
			SPJ - UP/GU/TU					
			s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI			
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	322.616.000,00	0,00	0,00	0,00	51.790.000,00	270.826.000,00	
			0,00	49.470.000,00	49.470.000,00			
			0,00	2.320.000,00	2.320.000,00			
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembaan	1.592.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000.000,00	72.000.000,00	
			0,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	750.660.000,00	0,00	0,00	0,00	553.300.000,00	197.360.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			553.300.000,00	0,00	553.300.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkulan Barang	263.520.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000.000,00	110.520.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			153.000.000,00	0,00	153.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	468.000.000,00	0,00	0,00	0,00	362.310.940,00	105.689.060,00	
			0,00	0,00	0,00			
			362.310.940,00	0,00	362.310.940,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	545.040.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000.000,00	49.040.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	496.000.000,00	496.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.182.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	582.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	12.600.000,00	12.600.000,00			
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU		BULAN INI		s.d BULAN INI		SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji							
			SPJ - LS Barang & Jasa							
			SPJ - UP/GU/TU							
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	307.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000.000,00	16.770.000,00		
			291.000.000,00	0,00	291.000.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	100.000,00		
			23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total	27.975.450.000,00	0,00	38.340.000,00	38.340.000,00	26.437.139.472,00	1.538.310.528,00			
			5.937.079.476,00	19.968.956.721,00	25.906.036.197,00					
			0,00	492.763.275,00	492.763.275,00					



Penerimaan

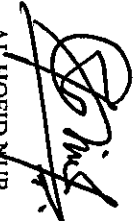
- SP2D	26.510.938,197,00
- Pajak Penghasilan Ps. 21	2.295.000,00
- Pajak Penghasilan Ps. 22	170.270,00
- Pajak Penghasilan Ps. 23	2.100.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai	1.248.648,00
- Lain-Lain	32.524.200,00
Jumlah Penerimaan	26.549.276.315,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU)	26.509.139,472,00
- Pajak Penghasilan Ps. 21	2.295.000,00
- Pajak Penghasilan Ps. 22	170.270,00
- Pajak Penghasilan Ps. 23	2.100.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai	1.248.648,00
- Lain-Lain	34.322,925,00
Jumlah Pengeluaran	26.549.276.315,00

Saldo Kas	0,00
-----------	------

Tenggarong, 2 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


AL HOFID NUR
NIP19720701 200701 1 023



